

Ironi Kemanusiaan di Indonesia

Laporan Utama

Memanusiakan Manusia dalam Indonesia
Versi Sila Kedua

Liputan Khusus

Kilas Balik Penegakan HAM yang Jalan di
Tempat



SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Tuhan Yang Maha Esa

PEMIMPIN UMUM

Virdian Jaya Yoslaza Chofa

PEMIMPIN PERUSAHAAN

Vinna Nurfadzillah

PEMIMPIN REDAKSI

Arya Putra Hadi Yulianto

REDAKTUR MAJALAH

Alifya Maulidina Isykharima

REDAKTUR PELAKSANA

Nuraica Martha Septian Wahyuni

EDITOR

Sinta Purwati

Shafa Ilona

Laksmi Ardayanti Syahbillah

Okvrisha Dwita Rusto Putri

Dimas Fahrizal Sulthoni

REPORTER

Aura Dewi Andini

Aditya Firman Roziansyah

Shanti Kumala Dewi

Yurischa Aulya Firnanda

Adinda Nur Sabhrina

Nabila Permatasari Handoko

Cahaya Azizah Briyana

Kirana Diffa Alethea Syahda

Rika Maharani

FOTOGRAFER

Deo Fahmawan

Resa Mahendra

Via Febriati

Sinta Yuni Kartika

Salsabila Rachma Aninda

LAYOUTER

Raihanah Aulya Kusumaputri

Faizatul Mukarromah

Amyrah Putri Hartanto

Ahmad Maududi Azmi

DISTRIBUTOR

Alivia Ramadhani

Nur Sukma Pandawa

SALAM REDAKSI

Salam Persma!

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, Majalah Cetak Edisi XXVII LPM Kompen dapat diterbitkan. Atas dukungan semua pihak yang telah membantu secara moral maupun material, kami sampaikan terima kasih.

Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai dan perkuliahan dalam jaringan (daring) yang melelahkan, majalah ini akhirnya lahir. Rentetan diskusi daring yang memakan waktu, reportase tiada henti, dan penyuntingan berkali-kali menjadi cerita tersendiri di balik produk ini. Dengan kerja sama tim dan keyakinan yang kuat untuk memberikan perubahan di masyarakat, semua hambatan kami selesaikan hingga rampunglah proses penerbitan.

Ironi Kemanusiaan di Indonesia menjadi tema dalam majalah kami kali ini karena semakin memprihatinkannya kondisi kemanusiaan di Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, cinta-kasih, tolong-menolong, dan gotong-royong semakin pudar dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus kemanusiaan seperti rasisme, kekerasan seksual terhadap anak dan wanita, dan perundungan di media sosial yang terjadi beberapa tahun terakhir. Banyaknya kasus ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami percaya, dengan terjaganya nilai tersebut maka kasus-kasus tersebut seharusnya tidak terjadi sebanyak ini.

Dengan terbitnya majalah ini, kami berharap dapat menjadi bacaan yang berkualitas dan memberikan sudut pandang baru dalam hal kemanusiaan bagi pembaca. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan, untuk meningkatkan kualitas produk kami selanjutnya. Selamat membaca!

DAFTAR ISI

Editorial	02	04	Laporan Utama
Liputan Khusus	08	12	Kilas Kampus
Profil	14	16	Sisi Lain
Galeri	18	20	Pernik
Infografis	22	24	Budaya
Ekspedisi	26	28	Sastra
Resensi	32	34	IPTEK
Terminal Pembaca	36	38	Opini
Komik dan Humor	40		

Indonesia dalam Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Apakah Bisa?

Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab telah menjadi landasan dalam mewujudkan kemanusiaan di Indonesia. Berdasarkan Butir-Butir Pengamalan Pancasila dalam Ketetapan MPR No. I/MPR/2003, terdapat sepuluh butir perwujudan sila kedua, di antaranya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban tanpa membedakan latar belakang, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Namun, walau telah merdeka selama 75 tahun nyatanya kemanusiaan di Indonesia kondisinya masih carut marut.

Terbukti dengan ramainya peristiwa pelanggaran kemanusiaan seperti pembungkaman dan penangkapan aktivis, pembubaran diskusi, kekerasan aparat terhadap demonstran dalam demo penolakan undang-undang, maraknya kasus pelecehan seksual terhadap wanita baik anak-anak maupun dewasa, konflik agraria, dan tindak rasisme terhadap masyarakat Papua. Jika berkaca pada sila kedua Pancasila, permasalahan ini tentu sangat memprihatinkan.

Demi terwujudnya kehidupan manusia yang saling memanusiaikan antar sesama, maka penyediaan sarana literasi mengenai kemanusiaan perlu untuk disebarluaskan. Hadirnya berbagai lembaga kemanusiaan seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), aksi Kamisan dan berbagai organisasi lainnya menjadi harapan bagi kondisi kemanusiaan di Indonesia. Dengan edukasi perlahan, diharapkan masyarakat dapat bersama mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab sesungguhnya di negeri ini.

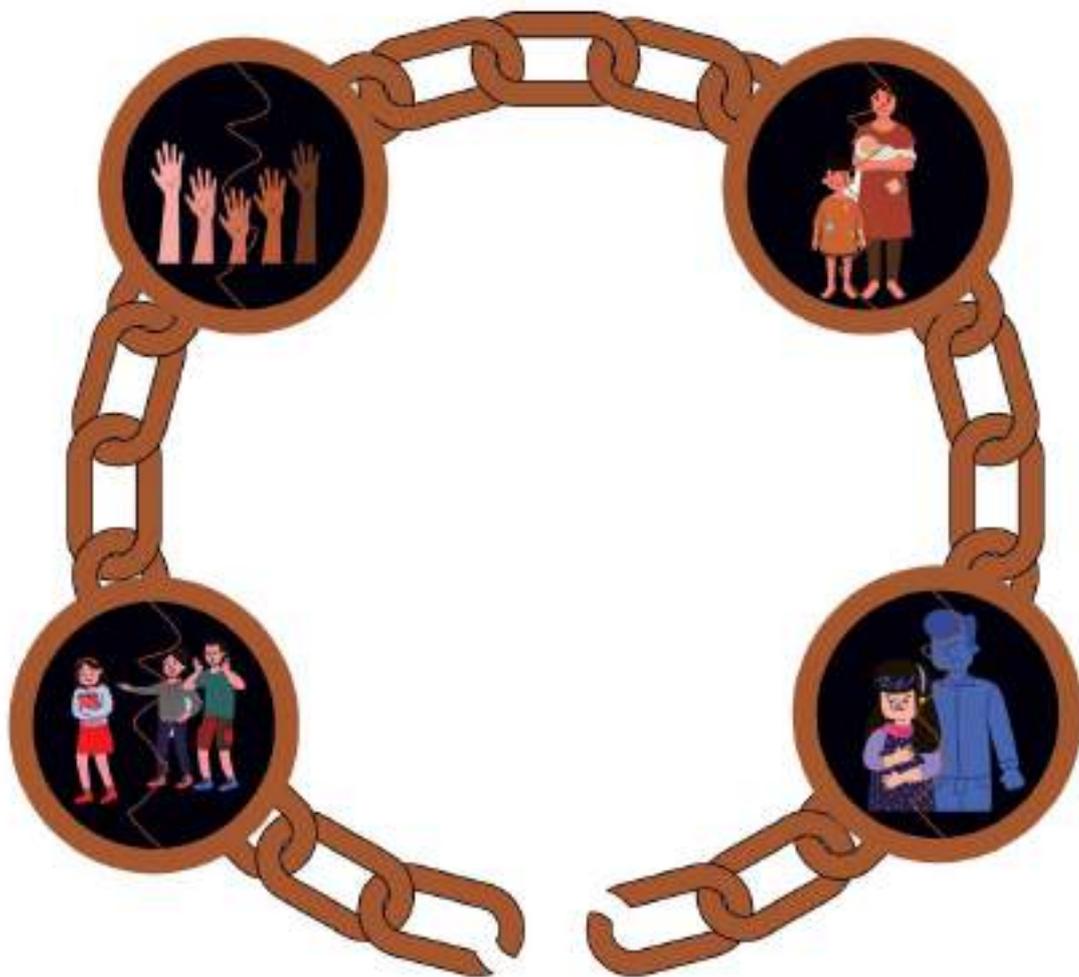




**THE GREATNESS OF
HUMANITY IS NOT IN
BEING HUMAN, BUT
IN BEING HUMANE.**
-MAHATMA GANDHI



MEMANUSIAKAN MANUSIA DALAM INDONESIA VERSI SILA KEDUA



Terputusnya Sila Kemanusiaan pada rantai Pancasila. (Via Febriati)

Apakah negara dan masyarakatnya sudah mengamalkan Pancasila terutama sila kedua dengan benar? Apakah kita telah memanusiakan manusia dengan selayaknya?

Konsep manusia telah dijelaskan sejak beberapa abad lalu oleh filsuf Yunani Aristoteles yaitu manusia adalah hewan yang berakal budi. Ahli Geologi Inggris terkemuka, Charles Robert Darwin juga menjelaskan jika secara biologis manusia tidak berbeda dengan monyet, yang membedakan adalah kemampuan manusia untuk memikirkan asal-usul dan berimajinasi. Artinya, manusia mempunyai akal untuk berpikir secara logis dengan akal dan budi pekerti untuk memperlakukan sesama dengan baik. Sifat manusia yang memanusiakan manusia ini bernama manusiawi.

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dengan kemanusiaan. Dosen mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan Politeknik Negeri Malang (Polinema) Dr. Hudriyah Mundzir, S.H.,M.H. menjelaskan jika kemanusiaan adalah tindakan untuk memanusiakan orang-orang di lingkungan mereka tanpa ada perbedaan baik suku, agama, ras, atau golongan. Senada dengan itu, Lukman Chakim dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Surabaya Pos Malang juga menjabarkan bahwa kemanusiaan merupakan hal yang sangat sakral dan melekat di diri setiap manusia. Menurutnya, kemanusiaan telah menjadi hak dasar manusia untuk memperoleh keadilan dan hak lain sebagai manusia tanpa harus bersusah payah untuk meminta. Lebih jauh lagi Prof. Hembing (dalam Siti Nafsiah, 2000: 165-166) menjelaskan jika kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberi perhatian antar manusia berdasarkan nilai kemanusiaan.

"Memaknai nilai kemanusiaan dengan cara kita berusaha memanusiakan orang-orang yang berada disekeliling kita," ujar Dr Hudriyah.

Menilik tentang nilai tersebut, Adi Eko (2005: 119) menjelaskan jika nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk tindakan kemanusiaan yang bersifat

universal. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah hak-hak asasi, kebebasan berpikir dan beragama, toleransi religius, keadilan sosial, jaminan hak minoritas, sistem peradilan yang tidak berpihak, prinsip non diskriminasi, pengakuan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, warna kulit, dan kedudukan sosial.

Sila kedua Pancasila merupakan perwujudan komitmen negara ini untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Pakar filsafat Prof. Dr. Michael dalam Pustaka.id menjabarkan prinsip-prinsip Pancasila sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" adalah mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil di mata hukum tanpa harus melihat seseorang dari latar belakangnya. Bukti pengamalan sila kedua ini tercantum dalam Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003. Butir-butir tersebut diantaranya seperti mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat dan hak asasi setiap manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain serta berani membela kebenaran dan keadilan.

Namun nyatanya, sila kedua Pancasila ini belum terimplementasi dengan benar. Ketidapkahaman tentang Hak Asasi Manusia menyebabkan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara ini.

Refleksi Penegakan dan Kasus HAM di Indonesia

Selama 75 tahun Indonesia merdeka, penghormatan terhadap HAM seolah dipandang sebelah mata. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pemerintah dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu yang tak kunjung usai. Rahmad Faisal, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya mengungkapkan jika dampak kasus yang tidak segera diselesaikan akan menimbulkan perulangan nantinya. "Permasalahan pelanggaran HAM yang tidak dihukum dan tidak diselesaikan maka tidak akan ada yang



Aksi damai Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, 15 Juni 2020. (Sumber: Dokumen Pribadi)

takut dan akan terulang,” ujar Rahmad.

Kedua, dapat dilihat dari sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. DPR kerap kali mengesahkan Undang-undang yang meresahkan contohnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Pengesahan UU tersebut selalu diwarnai dengan demonstrasi besar-besaran dan kekerasan aparat. Selain itu, langkah DPR untuk menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 juga memicu pergolakan. Mereka beralasan pembahasan RUU PKS ini cukup sulit sehingga terpaksa ditarik. Padahal peristiwa kekerasan seksual semakin marak terjadi. Sepanjang 2018, menurut laporan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, jumlah kasus mencapai 348.466 dan pada 2019 jumlahnya 406.178 kasus. Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad menuding kesulitan pembahasan RUU PKS ini dikarenakan tidak adanya kemauan politik dari legislator untuk memberikan keadilan bagi korban.

Dari segi kemasyarakatan, hal ini bisa dilihat dari kasus kekerasan aparat dan mahasiswa dalam demo penolakan RUU, dan peristiwa rasisme terhadap masyarakat Papua. Penyebutan monyet terhadap

mahasiswa pada 2019 di Surabaya yang menyulut demonstrasi besar-besaran di Jayapura juga menjadi contoh suramnya diskriminasi. Dr. Hudriyah menyebutkan penegakan hukum pada kasus Novel Baswedan yang disiram air keras dan pelaku penyiraman yang hanya mendapatkan hukuman dua tahun penjara, menjadi contoh kurangnya rasa kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Dr. Hudriyah menjelaskan jika pelanggaran kemanusiaan dapat disebabkan dari aspek psikologi pelanggar dan sistem negara. Pelaku yang merasa berpuas diri setelah melakukan kejahatan memiliki masalah psikologis sendiri dalam dirinya. Sedangkan dari segi sistem negara, tidak tegasnya aturan terkait kasus kemanusiaan seperti rasisme dan pelecehan seksual secara tidak langsung mempermudah seseorang untuk melakukan pelanggaran. “Kemudian faktor berikutnya adalah ketidaktepatan pelaksanaan hukum, penyalahgunaan teknologi, sikap tidak toleran, kesenjangan sosial yang tinggi, dan rendahnya kesadaran Hak Asasi Manusia,” ujar Dr. Hudriyah.

Lukman juga menjelaskan bahwa penyebab lain pelanggaran HAM yaitu karena ketidaktegasan dari pihak penegak

hukum dan pemerintah terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. “Yang bisa kita lakukan untuk saat ini adalah meminimalisir adanya pelanggaran kemanusiaan dengan memberikan edukasi kepada semua orang dan kepada stakeholder terkait,” ujar Lukman.

Menyadarkan melalui Edukasi

Edukasi dapat menjadi salah satu cara menanamkan kesadaran akan kemanusiaan dan pentingnya HAM bagi masyarakat Indonesia. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam webinar “Strategi Kebijakan dan Metode Pendidikan HAM di Masa Pandemi COVID-19”, pada Kamis (5-11) menuturkan jika Pendidikan HAM akan memunculkan kesadaran tentang harkat dan martabat manusia atau HAM yang wajib dipenuhi negara. HAM tidak hanya terkait dengan kekerasan, maupun diskriminasi. Namun, juga meliputi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan bersih, dan ramah disabilitas.

“Ketika bicara standar hak asasi manusia, belum banyak dipraktekkan bahwa itu adalah hak asasi manusia. Akibatnya, banyak terjadi persepsi publik soal hak asasi manusia itu sesuatu yang terus menyeramkan, kekerasan, diskriminasi, intimidasi, dan lain-lain,” ucap Beka.

Pendidikan hak asasi manusia, juga tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang tersebut diterangkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif.

Selain itu, komunitas juga dapat menjadi motor penggerak edukasi di masyarakat. Salah satunya komunitas Turun Tangan. Komunitas ini berfokus untuk membantu masyarakat yang kesusahan dalam aspek sosial, pendidikan dan budaya. Salah satu program mereka yakni Ruang Sinau,

berisikan kegiatan pengajaran pada daerah pelosok yang minim akses pendidikan. Mereka berfokus pada bidang ekstrakurikuler dengan mengajarkan minat dan bakat. “Kita lebih mengayomi dan mendedikasikan diri pada masyarakat sekitar, jadi bagaimana kita sebagai lembaga kemanusiaan ini, lebih ikut andil dalam perubahan,” ujar Firaz Apriyanto, anggota komunitas ini.

Menyikapi permasalahan kemanusiaan atau pelanggaran HAM di Indonesia, salah satu Aktivis Kamisan Malang, Dinda Ayu Taufani Mahardika berpendapat jika masyarakat harus semakin sadar untuk berani melawan akan tidak tegaknya HAM. “Harapannya semakin banyak orang sadar, semakin banyak orang yang melawan, melawan bisa dilakukan sesuai porsi masing-masing, terus juga yang penting kita jangan diam,” tutur Dinda. Dengan semakin banyaknya orang yang peduli dengan isu kemanusiaan, kasus kemanusiaan bisa berkurang. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan, Sutirta, SE. juga berharap dari masing-masing pribadi untuk terus belajar mengasahi sesama agar timbul rasa kepedulian terhadap sesama.

Memanusiakan manusia sesuai sila kedua dapat diawali dengan memahami arti kemanusiaan, butir-butir pengamalan sila kedua dan edukasi tentang HAM di masyarakat. Dengan mengedukasi tentang kemanusiaan, maka berbagai aspek kehidupan seperti pembuatan peraturan, penegakan HAM, tindak rasisme akan dapat diminimalisir dan terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Ketika seseorang mempunyai kesadaran HAM maka dia akan peduli. Kesadaran tentang hak asasi manusia yang tinggi tidak bisa langsung muncul itu harus dilatih,” ujar Dr. Hudriyah.

(Aura Dewi Andini)

KILAS BALIK PENEGAKAN HAM YANG JALAN DI TEMPAT



Potret permasalahan Hak Asasi Manusia di Indonesia. (Sinta Yuni)

Berdasarkan konsep negara hukum yang demokratis, negara wajib memberikan perlindungan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Namun sebaliknya, Indonesia sebagai negara demokratis malah memiliki permasalahan yang runyam dalam penegakan HAM. Dalam wawancara eksklusif dengan BBC News pada Februari 2020, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan dirinya lebih fokus dalam hal ekonomi daripada HAM. Rachmad Faisal, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, menganggap pernyataan itu menjadi penunjuk bahwa dalam pemerintahannya Jokowi tidak akan aktif dalam penyelesaian

HAM. "Dalam lima tahun ke belakang, banyak peristiwa pelanggaran HAM seperti pada demonstrasi Omnibus Law, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), kekerasan terhadap ribuan mahasiswa hingga meninggal dunia, dan tidak ada pihak kepolisian yang ditangkap menjadi tersangka," ujar Faisal.

Menengok penegakan HAM di Indonesia, Human Rights Watch (HRW) menilai kondisi HAM di Indonesia terus memburuk. Pada Januari 2020, HRW merilis *World Report* edisi ke-30 yang mengulas praktik HAM hampir 100 negara, termasuk Indonesia. Dalam laporan tersebut, HRW menulis pemerintahan Joko Widodo tidak mengambil langkah efektif dalam penegakan HAM. Selain itu pemerintah juga

tidak mendesak adanya penyelidikan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dalam laporannya, terdapat sembilan aspek yang menjadi masalah di Indonesia, diantaranya kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak perempuan dan gender, konflik papua, identitas gender dan orientasi seksual, hak disabilitas, lingkungan hidup, dan hak masyarakat adat.

Setara Institute, organisasi yang berfokus pada isu kemanusiaan ini melaporkan bahwa indeks kinerja HAM Indonesia 2020 menurun, dari yang sebelumnya 3,2 menjadi 2,9 dari skala 1-7. Penurunan ini disebabkan adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang secara normatif telah mengikis jaminan hak asasi manusia. Proses pembentukan UU Cipta Kerja dan penanganan penolakan UU oleh masyarakat telah berdampak pada pelanggaran hak sipil dan politik. Sedangkan norma-norma dalam UU Cipta Kerja secara normatif tidak supportif pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jika menengok data Komisi Nasional (Komnas) HAM, kasus pelanggaran HAM memang memprihatinkan. Pada bulan Januari—Agustus 2020 aduan mencapai 1792 dengan wilayah terbanyak datang dari DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Isu terbanyak diantaranya adalah

ketidakprofesionalan penanganan laporan, lalu diikuti sengketa lahan, ketenagakerjaan dan kepegawaian. Pihak terbanyak yang teradukan adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pihak korporasi, dan Pemerintah



Daerah (Pemda).

Lebih menarik lagi, pada 6 Mei 2020 pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Namun, pada kenyataannya Jatim termasuk provinsi yang menyimpan banyak potensi konflik, seperti konflik berlatar belakang agama, agraria dan sumber daya alam, serta kebebasan berpendapat. Selama 2019, KontraSmencatat setidaknya ada 19 kasus konflik berlatar belakang agraria di Jatim dengan luas tanah 6726 hektar. Faisal menjelaskan bentuk pengabaian oleh

Pemda ini dapat menyebabkan meningkatnya potensi konflik ke depannya. "Permasalahan agraria di Jatim seperti bom waktu, hampir semua berpotensi adanya tindak kekerasan. Aktornya didominasi warga sipil dan aparat hukum," tambahnya.

Maraknya Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual menjadi sorotan tersendiri karena datanya yang semakin banyak tiap tahunnya. Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam kurun waktu 12 tahun pada Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2020, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792%.

Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) juga melonjak dari 1.417 kasus menjadi 2.341. Di Jatim sendiri, berdasarkan laporan Catahu 2019 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, terdapat 112 kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 15 kasus (12,5%) menjadi yang terbanyak kedua setelah kasus hak perburuhan sebanyak 48 kasus (40%). LBH menilai hal ini disebabkan posisi perempuan masih rawan karena budaya patriarki yang mengakar di masyarakat.

Lukman Chakim selaku pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pos Malang mengungkapkan penyelesaian terkait kasus pelanggaran HAM memang cenderung jalan di

tempat. Di Kota Malang, kasus pelanggaran dalam perlindungan perempuan dan anak menjadi salah satu yang terbanyak. Hal ini terlihat dari data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Malang, sepanjang Januari—Juni 2020 terdapat sekitar 105 kasus yang didominasi kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Di lingkungan kampus Kota Malang, pelecehan seksual juga marak terjadi. Women Crisis Centre (WCC) mencatat ada 17 kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus selama periode Januari—Oktober 2020. Kekerasan seksual ini meliputi kekerasan verbal, fisik hingga ancaman dokumen pribadi di media sosial. Data ini perlu mendapatkan perhatian serius dari negara karena negara berkewajiban untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan di ranah internet.

Menurut Lukman, penegakan hukum di Indonesia selama ini belum memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sehingga, bisa saja kekerasan seksual terus terjadi dengan didukung faktor ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan budaya. "Korban tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan apabila tidak ada UU yang menjaminkannya," tambah dia. Bertambahnya jumlah angka kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa negara telah gagal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan

anak. Bahkan, banyaknya regulasi mulai dari nasional hingga internasional pun tidak menjamin perlindungan kepada mereka.

Dibungkamnya Kebebasan Berpendapat

Selanjutnya, kebebasan berpendapat menjadi kasus yang semakin parah. Negara seharusnya mampu menyediakan ruang diskusi yang aman tanpa represif. Namun yang terjadi malah sebaliknya, aksi unjuk rasa yang menjadi sarana untuk berekspresi diwarnai kekerasan oleh aparat keamanan, seperti pada aksi #ReformasiDikorupsi 2019 dan #TolakOmnibusLaw 2020. Berdasarkan data KontraS selama tahun 2020 terdapat 158 peristiwa pelanggaran, pembatasan, dan serangan terhadap kebebasan sipil yang terdiri atas hak asosiasi (4 peristiwa), hak berkumpul (93 peristiwa), dan hak berekspresi (61 peristiwa), dengan Polisi sebagai aktor utama. Perkembangan metode serangan terhadap kebebasan berekspresi pun semakin berkembang, diantaranya pembungkaman siber dalam bentuk peretasan, intimidasi, doxing, bahkan penyiksaan di ruang siber.

Di Kota Malang saja, KontraS mencatat angka penangkapan terhadap demonstran pada demo 8 oktober 2020 mencapai 129 orang. Selain itu, juga terdapat 15 jurnalis yang mengalami

kekerasan dari aparat saat sedang meliput aksi. Di Jakarta, aparat melakukan *sweeping* massa aksi disertai dengan pemukulan, penembakan gas air mata ke rumah-rumah warga, serta pemukulan terhadap relawan medis. Di Surabaya, dalam aksi tolak Omnibus Law juga terjadi tindakan perampasan telepon genggam dan kamera serta penghapusan data dokumentasi milik jurnalis yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal ini menandakan aparat polisi tidak memahami dan melanggar UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang melindungi jurnalis. "Kekerasan unjuk rasa ini menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum belum bisa mengimplementasikan HAM dengan baik. Dan ini sekaligus menjadi trek yang buruk sekali di Jawa Timur, mengingat dalam lima tahun terakhir tindak kekerasan unjuk rasa naik signifikan," ujar Faisal.

Rasisme yang Mendarah Daging

Tindak rasisme juga menjadi isu yang hangat terjadi beberapa tahun belakangan. Di Indonesia, warga pendatang dari Papua seringkali menjadi korban tindak rasialisme ini. Pada Agustus 2019 di Surabaya melansir dari tirto.id, asrama mahasiswa Papua dibombardir 23 kali tembakan gas air mata, hingga puncaknya sekitar 43 mahasiswa ditangkap paksa. Hal ini dipicu adanya bendera merah putih yang jatuh ke selokan di depan asrama

mahasiswa Papua. Asrama mereka dikepung Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ormas, serta berbagai makian rasis seperti penyebutan monyet bagi para mahasiswa Papua. Padahal pelaku pencopotan bendera pun masih belum jelas. Peristiwa ini pun memicu demo besar-besaran di Jayapura, Manokwari, dan Sorong. "Kami bukan bangsa monyet, kami manusia," teriak rakyat Papua dalam poster mereka. Demonstrasi di Papua ini meluas hingga merusak fasilitas seperti bandara, blokade jalan hingga pembakaran gedung penjara. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi payung untuk gerakan politik kemerdekaan Papua, mencatat polisi menangkap 226 mahasiswa Papua pada demo 14–18 Agustus 2019 di Jayapura, Maluku, Surabaya, dan Malang.

Di Politeknik Negeri Malang, Yuni Resa Agustha Ayomi, mahasiswa prodi D4 Akuntansi Manajemen mengaku sering mengalami tindak rasisme selama kuliah di Malang. Ia merasa tidak percaya diri karena dipandang tidak menyenangkan karena warna kulitnya. Yuni juga mengungkapkan jika kesulitan mencari kos padahal masih tersisa kamar kosong. Sejak meletusnya peristiwa rasisme di Surabaya, ia merasa kejadian rasisme lebih sering terjadi. Dampaknya, Yuni merasa kurang percaya diri untuk bersosialisasi.

Pandangan masyarakat yang negatif membuat ia takut bergaul dengan masyarakat luas.

Dr. Hudriyah Mundzir, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di Polinema mengungkapkan jika tindak rasisme disebabkan kurang adanya kesadaran mengenai perbedaan antar sesama. Dampak dari rasisme adalah timbulnya perpecahan antar kelompok, dan terganggunya kondisi fisik serta mental korban, seperti depresi, gangguan kecemasan, dan ketakutan terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan pengamatan Ronni Suryansyah, S.Hum., S.Pd. sebagai pengamat Sosial dan Budaya, peningkatan oleh pendatang luar Jawa yang ikut memasuki kota Malang merupakan faktor penyebab isu rasisme semakin bertambah. Umumnya, tindak rasisme terjadi ketika penduduk asli kota Malang melihat perbedaan terhadap penduduk luar kota Malang.

Bersama Menegakkan HAM

Buruknya kondisi penegakan HAM di Indonesia dilatarbelakangi dari ketidakinginan negara menyelesaikan pelanggaran hukum. Faisal mengungkapkan jika buruknya penegakan HAM akan mengakibatkan hilangnya berbagai jaminan terhadap hak, seperti jaminan keamanan, kehidupan yang layak, dan perlindungan dari terror. Konflik pelanggaran

"Kami bukan bangsa monyet, kami manusia," teriak rakyat Papua dalam poster mereka.

HAM yang tidak selesai akan memperbesar potensi pelanggaran terulang kembali. "Pemerintah memiliki komitmen rendah dan implementasi yang buruk terkait penyelesaian kasus HAM. Harus ada tindakan tegas bagi pelaku dan kontrol dalam penyelesaiannya," ujar Faisal.

Edukasi dapat menjadi cara untuk memperbaiki penegakan HAM di Indonesia. Lukman menjelaskan lingkungan terkecil dapat mencontohkan perilaku yang baik. Selain edukasi kepada masyarakat, edukasi juga dilakukan kepada penegak hukum atau pemerintah. Edukasi dapat dilakukan dengan cara mengadakan diskusi dengan beberapa lembaga, seperti kepolisian, LBH, peneliti, dan pihak lainnya. "Bukan hanya masalah korban, tetapi bagaimana caranya memberikan hukuman yang benar pada pelaku agar ia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah," ujar Lukman.

(Nabila Permatasari Handoko)



Menelaah Bhakti Karya Polinema, Apakah Efektif Membantu Masyarakat?

Mahasiswa D3 Teknik Sipil bersama Tim Bhakti Karya Polinema gotong royong dalam pembangunan Polinema Blue Bridge. (Sumber: Dokumen Istimewa)

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui Program Bhakti Karya Polinema, Politeknik Negeri Malang (Polinema) mencoba mengimplementasikan Tri Dharma tersebut. Program ini kurang begitu terdengar di kalangan mahasiswa. Untuk itu Kompen telah mencari tahu bagaimana cerita di balik program ini, apakah program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat?

Awalnya program ini dimulai sekitar akhir tahun 1980 saat masih dalam naungan Politeknik Brawijaya dengan nama Bhakti Karya Politeknik. Kemudian, pada tahun 2018 Drs. Awan Setiawan, MMT., MM., selaku Direktur membuat kembali program ini dengan nama Bhakti Karya Polinema (BKP). Di bawah koordinasi bidang kemahasiswaan, program ini bertujuan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dengan melibatkan dosen, teknisi, dan mahasiswa. "Bhakti Karya Polinema juga merupakan salah satu usaha untuk pencitraan, namun bukan dalam konotasi negatif. Maksudnya mengenalkan Polinema dan memberi manfaat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pencitraan di sini juga berarti menunjukkan eksistensi diri," ujar Dr. Eng. Anggit Murdani, S.T., M.Eng., selaku Pembantu Direktur (Pudir) III.

Lokasi yang dijadikan objek bhakti karya terlebih dahulu akan melalui proses survei dan dikaji oleh tim BKP. Tim ini akan menilai tingkat urgensi pilihan lokasi, lalu

dibandingkan untuk memilih lokasi yang paling cocok. Terkait dana yang digunakan, Polinema menggunakan anggaran yang telah tersusun di Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Sampai saat ini, beberapa program yang telah selesai antara lain, membangun sistem penyediaan air bersih di daerah Pantai Modangan Malang Selatan, pembuatan pondasi batu kali di tempat wisata Boon Pring Turen, dan yang terbaru yaitu merenovasi jembatan penghubung antara Jalan Terusan Kembang Turi dengan Dinoyo yang diberi nama Blue Bridge Polinema. Tidak hanya dalam bentuk fasilitas, kampus juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pelatihan yang dinilai dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti pelatihan untuk membuat kerajinan di daerah Poncokusumo.



Lalu lalang pengendara motor yang melewati Blue Bridge Polinema. (Sumber: Dokumen Pribadi)

Program bakti karya yang terbaru pada tahun 2019 kemarin adalah Blue Bridge Polinema. Jembatan ini awalnya dikeluhkan oleh masyarakat karena seringkali mengalami guncangan pada pondasinya dan memiliki kemungkinan rubuh. Tim BKP akhirnya merenovasi jembatan ini dengan pemberian struktur komposit pada pondasi jembatan sehingga lebih layak dan kuat. Dr. Drs. Burhamtoro, S.T., M.T., selaku Dosen Teknik Sipil sekaligus inisiator dan koordinator pada BKP tahun lalu mengaku jika jembatan tersebut sangat bermanfaat dan membantu memudahkan transportasi masyarakat. "Jadi transportasi dari arah Dinoyo menuju kampus menjadi lebih dekat. Bahkan, mengurangi kepadatan Jalan Soekarno-Hatta dan untuk masyarakat yang mau ke pasar atau ke tempat lain," tuturnya.

Namun, apakah program ini benar-benar berjalan efektif membantu masyarakat? Untuk itu kami menanyakan kepada Warga sekitar Blue Bridge yaitu Warno dari RT 04 RW 04. Ia mengaku perbaikan jembatan ini mempermudah transportasi masyarakat sehingga tidak lagi khawatir. "Jembatan ini jadi penghubung untuk jalan pintas ya, jadinya mempermudah akses jalan. Selain itu, dulu kalau lewat jembatan ini was-was takut kalau runtuh, sekarang sudah aman," jelasnya. Kegiatan ini juga menjadi sarana mahasiswa untuk mengaplikasikan materi yang telah diperoleh di kelas secara langsung di lapangan. Salah satunya adalah Cicik Istighfaroh, mahasiswa Program Studi (Prodi) D3 Teknik Sipil yang terlibat dalam proses pengerjaan jembatan. Ia mengungkapkan bahwa keterlibatannya memberi manfaat bagi dirinya untuk berkembang dan belajar di lapangan. "Jadi memiliki relasi, *improve* cara kita berkomunikasi dengan orang yang sebelumnya tidak pernah bertemu, dan bermanfaat sekali buat menambah pengalaman," paparnya.

Dalam prosesnya, BKP juga menghadapi kendala seperti cuaca, biaya dan transportasi hingga ke tujuan. Contohnya saat pembangunan sistem penyediaan air bersih di Pantai Modangan Malang Selatan. Kendala jarak yang mencapai sekitar tiga jam perjalanan menyebabkan sulitnya untuk berkunjung setiap hari. "Pembangunan jembatan ini kendalanya harus berburu dengan cuaca karena mendekati musim hujan, kendala yang kedua adalah biaya yang



Proses pembangunan Blue Bridge Polinema. (Sumber: Dokumen Pribadi)

terbatas sehingga harus betul-betul mengoptimalkan agar mencapai tujuan tetapi dengan biaya serendah mungkin," jelasnya.

Namun, program ini rupanya tidak berjalan di tengah pandemi *COVID-19*. Dr. Eng. Anggit Murdani, S.T., M.Eng selaku Pembantu direktur (Pudir) III menjelaskan pada tahun 2020, akibat pandemi yang terjadi kampus sangat sulit merealisasikan BKP karena harus kontak dengan masyarakat. Bantuan yang diberikan di masa pandemi pun bukan lagi berbentuk proyek tetapi bantuan operasional seperti sembako. "Kalaupun kita harus memberi bantuan kepada masyarakat, tidak dengan skema BKP dan sudah ada skema yang lain misalnya bakti sosial yang sifatnya memberi bantuan sembako atau semacam itulah. Itu ada alokasi terpisah (program terpisah) tidak terkait dengan Bakti Karya Polinema," ujar Pudir III.

Meskipun sampai saat ini kegiatan bakti karya masih dilakukan di daerah Malang, beliau berharap agar jangkauan BKP bisa menyebar luas dan lebih dikenal masyarakat. "Tentunya ingin membuat program yang bisa memberikan manfaat yang lebih banyak, tidak hanya membangun saja, tetapi juga bagaimana masyarakat menjaga, memberdayakan, dan mengembangkan apa yang sudah dibangun," harap Pudir III. BKP memang telah banyak membantu masyarakat. Meskipun tahun ini program BKP tidak berjalan, menjadi kesadaran kita sebagai mahasiswa untuk mengawal program ini agar tidak terlupakan.

(Shanti Kumala Dewi)

Ali Nursahid, Sosok Gigih Pembela Hak Asasi Manusia



Ali Nur Sahid. (Sumber: Dokumen Istimewa)

Aktivisme dan kemanusiaan merupakan dua hal yang selalu berkaitan. Munculnya gerakan kemanusiaan tak bisa lepas dari peran aktivis, contoh saja aksi Kamisan. Aksi damai yang konsisten berjalan setiap hari kamis ini tidak muncul begitu saja, tentu ada sosok yang memulainya. Salah satu dari orang-orang tersebut adalah Ali Nur Sahid

Pria kelahiran tahun 1979 asal Pati, Jawa Tengah ini merupakan seorang peneliti, penulis, dan aktivis. Ia dikenal sebagai koordinator Kamisan Jakarta dan telah aktif sejak awal Kamisan dilaksanakan. Ali sekarang bekerja sebagai peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Universitas Paramadina (PUSAD Paramadina). Kesibukan yang sedang digelutinya tak jauh dari persoalan riset sosial, politik, agama, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia

menamatkan pendidikannya di S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum. Setelah lulus pada tahun 2005, ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Paramadina Fakultas Komunikasi Politik.

Ali banyak terjun dalam berbagai kasus kemanusiaan terutama pelanggaran HAM. Pada masa kuliahnya ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (KOMPAK). Ali juga tergabung sebagai anggota di tim monitoring dalam proses pengadilan HAM berat di Indonesia, yakni kasus Tanjung Priuk 1984. Karena hal tersebut, Ali berkenalan dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sampai akhirnya ia memutuskan untuk bergabung di sana hingga 2013. Di sana ia menangani kasus-kasus HAM di masa lalu seperti tragedi 1965-1966, tragedi Trisakti, tragedi Semanggi I dan II, peristiwa Tanjung Priuk 1984, peristiwa Talangsari di Lampung (1989), dan penculikan aktivis 1998. Posisi terakhir yang didudukinya saat itu sebagai Kepala Divisi untuk Jaringan dan Kampanye.

Dalam gerakan Kamisan, dirinya telah terjun sejak pertama kali aksi digelar pada sekitar tahun 2007. Hingga saat ini Kamisan telah diselenggarakan sebanyak 670 kali dan juga telah dilaksanakan di 39 kota dan 22 provinsi. Selain Kamisan, ia juga aktif dalam Gerakan Masyarakat Kendeng. Gerakan ini terjadi karena konflik agraria terkait pembangunan pabrik semen di Pegunungan

Kendeng, Pati, Jawa Tengah. Tak cukup sampai disitu, ia juga sosok yang dekat dengan Suciwati selaku istri Alm. Munir dan sekarang Ali menjabat sebagai Ketua Program Omah Munir yang berlokasi di Batu, Jawa Timur. Dirinya menilai pengembangan gerakan sosial tidak harus melalui aksi, tetapi juga diskusi dan kebudayaan dalam museum. Dengan menggaet anak muda, ia sukses menggagas bermacam konsep untuk pengembangan gerakan sosial, seperti pementasan teater, pemutaran film dokumenter, dan pameran foto.

"Saya memilih untuk tetap menjadi aktivis ini ya karena memang senang aja, menjiwai, menikmati juga prosesnya, juga ada suara di hati kecil saya, nggak bisa nih kalau situasinya begini mulu, ada orang demo direpresi, ada kebijakan sewenang-wenang, gatal aja untuk ikut terlibat," ungkap Ali.

Di usia yang berkepal empat ini, Ali telah menuangkan beberapa tulisan yang dimuat di kolom opini dan telah menulis buku berjudul *Keluar Dari Ekstremisme*. Selain menjadi peneliti, Ali juga aktif menulis di berbagai kolom opini milik Tempo, Kompas dan beberapa media daring lainnya. Salah satu tulisan opininya terbit di majalah Tempo dengan judul "Reformasi dan Sampah Gelap Demokrasi".

Ali adalah sosok yang mengonsep dan mengorganisir aksi di berbagai daerah. Ia memiliki visi untuk membuat gerakan sosial lebih sistematis dan besar. Setiap tahun, ia selalu membuat acara Kupatan di Kendeng dan seringkali ia mengajak musisi seperti Jason Ranti, Efek Rumah Kaca, Figura Renata dan Saras Dewi untuk berkolaborasi. Menurutnya menjadi seorang aktivis harus bisa membangun imajinasi gerakan. Merencanakan bagaimana gerakan akan berjalan. Namun, sebagai penggerak dan

pengonsep, Ali jarang muncul di hadapan publik, ia lebih mendorong orang yang lebih muda untuk maju.

"Jadi saya sebagai aktivis itu mikir, gimana caranya supaya orang ini misal gak bisa ikut aksi, tapi tetap ikut berpartisipasi. Misal dengan ikut nulis rilis saja meskipun enggak ikut aksi. Jadi kayak pembagian mobilisasi sumber daya, bagian keterampilan itu menurut saya harus dimiliki aktivis. Insting harus punya. Karena tantangannya berat," ujar Ali.

Di balik perjuangan menjadi aktivis tentu terdapat suka duka yang dihadapi. Melalui gerakan aktivisme sosial di berbagai daerah, ia mendapatkan banyak teman hampir di seluruh Indonesia. Orang-orang di balik gerakan sosial pun beragam mulai dari dosen, profesor antropologi, hingga musisi. Namun menjadi aktivis juga beresiko, contoh saja aksi Kamisan yang dianggap separatistis karena mengangkat isu papua. "Kalau gak diPKI-kan, dianarkikan, ya diseparatiskan," terangnya.

Banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang belum sadar akan pentingnya isu HAM sangat disayangkan oleh Ali. Padahal kemanusiaan merupakan isu universal yang perlu diperjuangkan karena terdapat nasib orang banyak di dalamnya. Ali berharap masyarakat tidak alergi terhadap kebijakan pemerintah. Ajakan untuk masyarakat agar terlibat dalam gerakan sosial juga dapat dibungkus dengan lebih menarik seperti kelompok diskusi. "Partisipasi masyarakat dalam isu-isu publik itu gak hanya melalui pemilu. Kalau kamu peduli dengan negara ini ya harus peduli juga dengan isu yang terkait dengan masyarakat banyak," pungkasnya.

(Kirana Diffa Alethea Syahda)

Masalah Kemanusiaan dan Stigma, Serang Kesehatan Mental

Kemanusiaan berkaitan erat dengan kesehatan mental. Berbagai faktor seperti hubungan keluarga, sosial, budaya, lingkungan dan faktor kemanusiaan lainnya, dapat berpengaruh bagi kesehatan mental. Masalah kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan merupakan beberapa contoh yang sering terjadi. Ditambah lagi dengan stigma negatif terhadap penderita penyakit mental, menjadikan kondisi kesehatan mental di Indonesia tidak kunjung membaik.

Melalui rubrik ini, kami menyoroti bagaimana masalah kesehatan mental muncul dari masalah kemanusiaan serta stigma negatif yang mengikutinya.

Kondisi Kesehatan Mental di Indonesia

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Dengan kesehatan mental yang baik, maka seseorang dapat menangani stres, berhubungan dengan orang lain dan membuat pilihan sendiri dengan baik.

Berdasarkan data riset kesehatan dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2018, menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional mengalami peningkatan. Pada penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, angkanya meningkat dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 9,8 % pada 2018. Artinya, sekitar 12 juta penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas menderita depresi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat dalam kurun waktu sembilan tahun dari 2011 sampai dengan 2019, tindak *bullying* trennya terus meningkat mencapai 2.473 laporan. Selama pandemi COVID-19, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) juga melaporkan, mulai 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, di antaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.

Angka-angka ini tergolong tinggi. Data tersebut membuktikan jika masalah kemanusiaan dan kondisi kesehatan mental tidak kunjung membaik di Indonesia. Contoh lain adalah kasus perundungan yang terjadi pada Februari 2020 di Kota Malang. Seorang siswa berinisial MS di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 16 Kota Malang, harus kehilangan

dua ruas jarinya untuk diamputasi karena dirundung oleh teman-temannya. Tubuh MS diangkat beramai-ramai dan dibanting di atas lantai paving sekolah. Korban syok dan mengalami guncangan psikis. Pelaku sendiri menganggap bahwa mereka hanya iseng dan bercanda. Dari kasus perundungan tersebut, terlihat jika sikap saling memahami masih kurang dan dapat berakibat ke kondisi mental korban.

Bagaimana Kasus Kemanusiaan Berdampak pada Kesehatan Mental?

Azmul Fuady Idham, S.Psi, M.Psi, founder Halo jiwa Indonesia menjelaskan bahwa dampak dari pelanggaran nilai kemanusiaan seperti *cyberbullying* terhadap kesehatan mental adalah harga diri korban yang terluka. Korban akan merasakan perasaan tidak berguna dan berakhir dengan *self blaming*. Perilaku menyalahkan diri sendiri tersebut berakibat pada emosi dan perilaku individu. "Ketika dia mendapat serangan dari luar, akhirnya dia menginternalisasi perkataan orang lain dan itu dia menyerang dirinya sendiri, *self blaming* jadinya," paparnya. Selain itu, korban juga tidak akan hadir untuk dirinya sendiri dan akan menganggap dirinya asing. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan bercerita kepada orang-orang terdekat atau ke psikolog serta menghindari perasaan memendam yang dapat memicu stres.

Ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu (faktor biologis) sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis (faktor psikologis) seperti perundungan, kekerasan terhadap anak, konflik antar sesama, tindak rasisme atau ditinggal mati orang yang disayang. Mengingat beberapa peristiwa traumatis tersebut kerap terjadi belakangan ini, maka terdapat beberapa gangguan mental yang harus diwaspadai. Melansir alodokter.com, berikut adalah jenis gangguan mental yang sering terjadi:

1. Depresi

Depresi adalah kondisi seseorang yang mengalami kesedihan secara terus-menerus. Kesedihan pada depresi dapat terjadi dalam hitungan minggu hingga bulan. Orang depresi akan merasa tidak berharga dan akan membenci diri sendiri. Penyebab depresi dapat berasal dari pengalaman traumatis atau adanya ketidakseimbangan hormon di otak.

2. Kecemasan

Gangguan kecemasan atau ansietas adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu berhenti mengkhawatirkan situasi atau hal sepele. Penderita dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama. Biasanya gangguan ini dipicu dari kejadian traumatis, pola pikir berlebihan atau faktor biologis.

3. Gangguan Bipolar

Penderita Bipolar dapat mengalami perubahan suasana hati yang ekstrem. Mereka dapat merasa sedih hingga depresi dalam periode tertentu, kemudian berubah menjadi gembira dalam periode yang lain. Bipolar dapat disebabkan oleh faktor biologis dan stress yang ditangani dengan buruk.

4. Skizofrenia

Skizofrenia adalah jenis penyakit mental dimana penderita tidak bisa membedakan antara kenyataan dan khayalan. Penderita akan mengalami psikosis dan diikuti dengan berkurangnya motivasi, ekspresi, dan aktivitas. Biasanya disebabkan dari depresi ibu selama kehamilan dan riwayat keluarga.

Stigma Negatif Terhadap Penderita

Stigma menjadi hambatan utama sulitnya pengobatan masalah kesehatan mental di Indonesia. Dilansir dari seributujuan.id, stigma diartikan sebagai diskriminasi terhadap seseorang karena karakteristik tertentu pada diri mereka. Stigma negatif ini seringkali ditujukan kepada mereka yang mengalami gangguan mental.

Perilaku masyarakat yang cenderung meremehkan gangguan mental, menjadi hambatan korban untuk sembuh. Azmul menyontohkan ketika korban pelecehan seksual berani *speak up* terkait kondisi mentalnya, ia akan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. "Semua masyarakat harus tau kalau perasaan mereka itu tertekan di semua lini. Jadi dilema juga, ketika mau *speak up* takut mendapat *judge* yang berlebihan, bahkan dihujat dimana-mana. Ketika sudah *speak up* ternyata tidak didukung oleh masyarakat dengan baik," ujar Azmul.

Terdapat tiga komponen utama yang menyebabkan timbulnya stigma ini. Pertama, adalah kurangnya pengetahuan suatu subjek, contohnya anggapan, "Orang penyandang depresi itu berbahaya." Kedua, sikap atau prasangka yang menyebabkan reaksi emosional, contoh, "Dia berbahaya, saya takut." Ketiga, perilaku seperti diskriminasi, contoh, "Dia berbahaya, jangan dekat-dekat."

Stigma semacam ini akhirnya diamini oleh penderita dan menjadi stigma diri. Stigma diri dapat mengakibatkan seseorang menerapkan perilaku negatif terhadap diri mereka sendiri dan



Stigma negatif dapat mengakibatkan tindakan *self harm*.
(Resa Mahendra)

masyarakat, memburuknya kesehatan, dan tidak ada keinginan mencari pengobatan. Azmul beranggapan jika hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi mengenai kesehatan mental terhadap masyarakat. "Karena stigma yang masih besar berbanding lurus dengan pengetahuan. Jadi karena pengetahuannya minim, jadi stigmanya tinggi. Jadi stigma masyarakat terhadap perilaku mental apa pun itu masih tinggi," ujar Azmul.

Di Polinema, edukasi mengenai kesehatan mental masih jarang terjadi. Fasilitas konseling mengenai kesehatan mental pun tidak ditemui. Padahal beban kuliah yang berat dapat menjadi penyebab depresi atau gangguan mental lainnya. Polinema mengandalkan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan Prastudi sebagai langkah preventif untuk menggembeng mahasiswa agar memiliki nilai kemanusiaan yang baik antar sesama. "Contoh anda diajari untuk hidup bersama dengan teman-teman yang lain, komunikasi bersama kemudian disuruh untuk tidak apatis dan seterusnya itu merupakan langkah yang ditempuh kampus Polinema," ujar Dr. Hudriyah Mundzir, S.H., M.H. selaku Dosen Pancasila.

Permasalahan kemanusiaan seperti stigma dan tindakan kekerasan yang menimbulkan traumatis, terbukti berpengaruh terhadap kesehatan mental. Dibutuhkan edukasi tentang isu ini agar masyarakat sadar akan permasalahannya. Azmul berpesan, agar masyarakat memahami diri sendiri sebelum memahami arti dari kemanusiaan demi menjaga kesehatan mental. "Dengan memahami diri sendiri itupun merupakan satu langkah untuk memanusiakan orang lain. Ketika seseorang belum bisa memahami diri sendiri, dia tidak akan dapat memahami orang lain," ungkapnya.

(Aura Dewi Andini)



Menanti dalam Hening

Fotografer **Via Febriati**
Kamera **SONY ILCE-6400**
Shutterspeed **1/3200**
Diafragma **2.2**
ISO **3200**



Karena Kehidupan Ini Butuh Kerja Keras

Fotografer **Via Febriati**
Kamera **SONY ILCE-6400**
Shutterspeed **1/4000**
Diafragma **2.2**
ISO **2500**



Berharap Berkah Segera Datang

Fotografer	Chaidarrahat Yudhistira Sofyan
Kamera	NIKON D5500
Shutterspeed	1/100
Diafragma	4.8
ISO	400



Menunggu Giliran

Fotografer	Arya Putra Hadi Yulianto
Kamera	SONY ILCE-6000
Shutterspeed	1/125
Diafragma	5.6
ISO	3200

Tiga Lagu Bernafaskan Kemanusiaan

Berbagai kasus kemanusiaan yang kian bertambah di Indonesia rupanya menarik perhatian para musisi. Mereka unjuk kepedulian dan memperjuangkan isu-isu kemanusiaan lewat lagu. Lagu yang diciptakan menggambarkan penderitaan warga yang tergusur, aktivis hilang yang terlupakan, dan hal lain mengenai kemanusiaan. Berikut adalah tiga lagu yang berbicara mengenai isu kemanusiaan di Indonesia:

Papua Ku Cinta - Iksan Skuter



Cover album Papua Ku Cinta.
(Sumber: Terakota.id)

Lagu Pertama berjudul "Papua Kucinta" yang diciptakan oleh musisi asal Malang, Iksan Skuter pada tahun 2012 silam. Lagu ini masuk ke dalam album kompilasi bertajuk "Papua Itu Kita" yang dirilis tahun 2015 dan kemudian dirilis kembali pada tahun 2019 dalam albumnya sendiri yang berjudul "Lumintu".

Lagu ini lahir setelah Iksan melihat kondisi manusia dan alam yang ada di Papua. Ia menumpahkan semua yang diketahuinya ke dalam lagu tersebut. Jika dilihat bagaimana ketimpangan antara Papua dengan daerah lainnya, lagu ini berisi harapan yang ia didedikasikan untuk saudara timur kita.

Iksan melalui lagu ini bercerita tentang rakyat Papua yang mendapatkan perlakuan rasisme karena kulit hitam mereka. Dalam lagu ini Iksan juga mempertanyakan darimana asal kemerdekaan Papua

sekarang, ia meyakini jika Papua di Indonesia tercipta dari konspirasi dunia.

"Yang pasti bukan anak Australia
Yang pasti bukan anak Malaysia
Kami tercipta dari konspirasi dunia
Lihatlah kami Indonesia bukan hanya Jawa
Indonesia bukan hanya Jakarta
Papua, Papua pun ada."

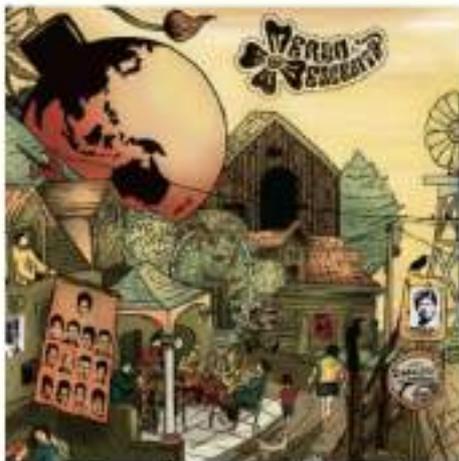
Penggalan lirik lagu "Papua Kucinta" di atas menunjukkan Indonesia yang terlalu fokus kepada Jakarta, sedangkan Papua kerap dianaktirikan keberadaannya. Selain itu, lagu ini juga bercerita tentang banyaknya sumber daya alam Papua yang diambil dan dibalas dengan kekerasan oleh aparat.

Penggambaran keadaan tanah Papua yang diungkapkan dalam lagu ini memiliki harapan akan timbulnya kesadaran kepada para pendengar. Lagu ini menyiratkan sebuah pesan untuk selalu mengintrospeksi diri bahwa kita semua bersaudara dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia.

Kebenaran Akan Terus Hidup - Fajar Merah

"Aku akan tetap ada dan berlipat ganda
Siapkan barisan dan siap tuk melawan
Aku akan tetap ada dan berlipat ganda
Akan terus memburumu seperti kutukan."

"Kebenaran Akan Terus Hidup" merupakan lagu Fajar Merah yang ia dedikasikan atas penghilangannya Wiji Thukul. Wiji Thukul sendiri adalah seorang penyair dan aktivis yang populer di masa orde baru dan ayah bagi Fajar Merah. Lagu ini dirilis



Cover album Merah Bercerita.
(Sumber: warningmagz.com)

tahun 2015 oleh Fajar Merah dan teman-temannya melalui album perdana berjudul "Merah Bercerita" beserta delapan lagu lain di dalamnya.

Lirik lagu ini merupakan musikalisasi dari puisi kebenaran akan terus hidup karangan Wiji Thukul. Dalam puisi tersebut, digambarkan tentang usaha menyuarakan kebenaran yang tak akan padam meski pemerintah mencoba membungkamnya. Fajar merah menyanyikan lagu ini juga sebagai wujud kritik lambannya pemerintah Indonesia terhadap pengusutan kasus aktivis yang hilang.

"Karena kebenaran akan terus hidup
Sekalipun kau lenyapkan
Kebenaran takkan mati."

Begitulah penggalan lirik dari lagu karya Fajar Merah yang menyampaikan tentang kebenaran tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Puisi ini dinyanyikan oleh Fajar dengan nada yang garang, tegas dan sederhana, menjadikannya mudah untuk diingat dan dinyanyikan.

Bahagia Melawan Lupa - Sombanusa

Lirik yang pedas dan kritis, petikan gitar yang syahdu telah menjadi ciri khas dari Sombanusa. Jika lazimnya, lagu perjuangan dinyanyikan dengan nada yang tegas dan tempo cepat, maka lain dengan lagu ini. Sombanusa atau yang bernama asli Muhammad Asy'ari merupakan aktivis berdarah Ambon. Ia menciptakan lagu



Foto penyanyi Sombanusa live at Ruang Gulma.
(soundcloud.com)

"Bahagia Melawan Lupa" untuk mengenang aktivis, pejuang Hak Asasi Manusia (HAM), dan semua korban kasus kemanusiaan yang hingga kini belum jelas akhirnya.

"Munir kita lupa
Wiji kita lupa
Marsinah kita lupa
Udin kita lupa."

"Mari bersama saling mengingatkan
saling menguatkan
dan jangan lupa."

Dari lirik di atas, kita tahu bahwa Munir, Wiji Thukul, Marsinah, dan Udin merupakan nama-nama yang hingga kini kasusnya belum terungkap. Marsinah dan Udin ditemukan tak bernyawa karena dibunuh, Wiji Thukul menghilang, dan Munir diracun dengan zat arsenik. Sampai sekarang, motif pembunuhan dan penculikan tersebut tidak diketahui dengan jelas.

Melalui lagu ini Sombanusa mengajak kita untuk menolak lupa akan sejarah. Dinyanyikan dengan petikan gitar yang menenangkan, Sombanusa berhasil memberikan pesan yang pedas dengan gaya yang syahdu. Ia mengajak kita untuk saling mengingatkan dan meluruskan antar sesama. Satu lirik yang sangat *memorable* adalah, "Sebab yang sejati dari pertemuan adalah kita harus rajin mengingatkan."

(Yurischa Aulya Firnanda)

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, Jokowi lebih mementingkan ekonomi dahulu daripada penegakan HAM. Padahal, dalam periode pertama, banyak terjadi pelanggaran HAM dalam berbagai aspek yang belum terselesaikan.

“Prioritas yang saya ambil memang di bidang ekonomi terlebih dahulu. Tapi, memang bukan saya tidak senang dengan urusan HAM atau tidak senang dengan lingkungan, tidak, kita juga kerjakan itu.”

Sumber: bbc.com

Kekerasan terhadap perempuan dan anak



- Pada Januari – Juni 2020 terdapat 105 kasus kekerasan seksual.
 - 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus Kota Malang pada Januari – Oktober 2020.
 - Dalam kurun 12 tahun kekerasan terhadap perempuan meningkat 792%.
 - Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) sejumlah 2.341 kasus.
 - Pengaduan kasus *cyber crime* (ancaman dokumen pribadi) sejumlah 281 kasus.
- Sumber: Woman Crisis Center dan Catahu Komnas Perempuan 2020



Pengesahan UU yang mendemoralisasi HAM



Beberapa undang-undang berhasil disahkan yang berpotensi menciderai dan melemahkan upaya perlindungan HAM, di antaranya:

Undang-Undang Minerba (UU No. 3 Tahun 2020)	Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU No. 7 Tahun 2020)
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 19 Tahun 2020)	Undang-Undang Cipta Kerja

Sumber: Indeks kinerja HAM Setara Institute 2020

Konflik Papua dan Rasisme



Perilaku rasisme kepada Mahasiswa Papua yang terus berlanjut dari tahun ke tahun :

Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Aliansi mahasiswa papua menggelar <i>long march</i> pada 13 - 16 Juli 2016. • 15 Juli 2016, Ormas melakukan tindakan <i>hate speech</i> di sekitar Asrama Papua Kamasan I Yogyakarta. • Tindakan berupa kekerasan verbal dan unsur rasisme .
Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Aliansi mahasiswa papua mengadakan diskusi dan pemutaran film "Peringatan 20 tahun Peristiwa Blak Berdarah (1998)". • Diskusi dilakukan bertahap di Malang, Surabaya, dan Papua. • Aparat melakukan pembubaran diskusi dengan alasan operasi yustisi. • Demonstrasi besar-besaram di Malang, Surabaya, dan Papua.
Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> • 226 Mahasiswa Papua ditangkap. • Terjadi ujaran rasisme penyebutan "monyet" untuk warga Papua di Malang dan Surabaya.

Sumber: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016 dan 2019

Reporter: Yurischa Aulya Firnanda
 Ilustrator: Via Febriati

Menengok Situasi Penegakan HAM di Indonesia

Data kasus pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM RI:



Sumber: Laporan Tahunan Komnas HAM 2018, 2019, dan Laporan Bulanan Komnas HAM 2020



Human Right Watch (HRW) merilis *World Report* edisi ke-30 tahun 2020 mengenai praktik penegakan HAM di 100 negara termasuk Indonesia. Ada sembilan aspek masalah HAM di Indonesia :



Sumber: hrw.org

Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang Belum terselesaikan

- Kasus Tanjung Priok
- Kerusuhan 13 - 15 Mei 1998
- Talangsari 1989
- Penculikan Aktivistis 1997/1998
- Tragedi Trisakti

Sumber:kontras.org

Kebebasan berekspresi dan berpendapat

KontraS mencatat selama tahun 2020 terdapat:

- 158 peristiwa pelanggaran, pembatasan, dan serangan terhadap kebebasan sipil.
- Pembubaran diskusi oleh aparat seiring berjalannya penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
- 59 kasus kriminalisasi berbasis UU ITE pada rentang Januari-Oktober 2020.

Sumber: Catatan SAFEnet dan kontraS

Dampak Normalisasi *Bullying* di Televisi



Budaya perundungan pada acara televisi. (Resa Mahendra)

Televise merupakan media massa yang menyajikan berbagai acara untuk mengisi waktu luang. Masyarakat mendapatkan hiburan dan informasi dari tayangan televisi. Namun permasalahannya, televisi seringkali mempertontonkan tindakan *verbal bullying* yang terlewat batas. Fenomena ini terjadi di beberapa tayangan *reality show*. Padahal penonton televisi tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak. Hal ini mengkhawatirkan, karena anak-anak dapat mencontoh tayangan tersebut dan *bullying* yang semakin dianggap lumrah bagi masyarakat.

Kekerasan verbal banyak ditemui di beberapa tayangan komedi. Para artis menggunakan berbagai ungkapan, kata,

ejekan untuk menjadi bahan komedi. Padahal, menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 Pasal 36 Ayat 6 menjelaskan bahwa isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Contoh acara televisi tersebut adalah "Pesbukers". Acara komedi yang disiarkan oleh ANTV ini beberapa kali melakukan *verbal bullying* dalam acaranya. Salah satunya dapat dilihat dari teguran KPI di laman www.kpi.go.id untuk acara "Pesbukers" pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 16.16 WIB. Dalam tayangan tersebut, terdapat seorang pria berkata, "saya pikir RA itu ya singkatan dari Ruben Asu." Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI) menggolongkan ini sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran untuk memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan serta kewajiban program untuk melindungi kepentingan anak.

Normalisasi *Bullying* dalam Tayangan

Dosen Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan sekaligus pengamat media, Kusnul Fitria, M.A., mengatakan sangat prihatin dengan acara televisi yang semakin menormalisasi *bullying* menjadi hal yang lucu. Menurutnya hal ini disebabkan kurangnya penyaringan konten yang menjurus ke arah *bullying*. Kusnul menjelaskan jika *body shaming* sering kali ditampilkan dalam acara-acara komedi. Ironinya, acara seperti itu malah mendapat respon positif di masyarakat. Ditandai dengan *rating and share* terhadap acara jauh lebih tinggi daripada acara lain. Akibatnya berbagai stasiun televisi berlomba-lomba menghadirkan acara serupa untuk memenuhi keinginan masyarakat.

Berdasarkan riset, tayangan televisi ternyata dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Wilson (dalam Masdin, 2009:80) film, bahan bacaan, dan tayangan televisi, dapat memberi efek perilaku negatif seperti; anti sosial, rendahnya rasa sensitivitas pada kekerasan, meningkatkan rasa ketakutan menjadi korban perundungan, dan sikap agresif. Berdasarkan survei yang dilakukan Kompas (Saripah, 2006) memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan film, umumnya mereka meniru gerakannya (64%) dan kata-katanya (43%). Hal ini tentu mengkhawatirkan. Karena penonton tayangan televisi beragam, mulai dewasa hingga anak-anak. Pengamat media Ronni Suryansyah, S.Hum., S.Pd. menjelaskan jika

korban *bullying* daripada orang dewasa karena kepribadian mereka belum matang. "Dalam budaya kita lelucon dianggap sebagai sebuah identitas untuk sebuah keakraban. Akan tetapi, ketika kita berbicara tentang anak-anak, kita harus berhati-hati karena sebuah sistem yang terbangun dari paling bawah akan menjadi sebuah kebiasaan," tutur Ronni Suryansyah.

Kesalahan tidak sepenuhnya ditujukan pada pihak stasiun televisi karena mereka hanya menyuguhkan acara yang diinginkan masyarakat. Kusnul menjelaskan tayangan komedi bermasalah tersebut adalah representasi masyarakat Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan tingginya rating dari acara tersebut. Sebab lainnya adalah kurangnya literasi di masyarakat. Mereka cenderung menyukai tayangan ringan tanpa harus banyak berpikir untuk menikmatinya. "Mereka selalu mencari profit sehingga mereka hanya menyediakan apa yang diinginkan masyarakat," ujar Kusnul.

Peran semua pihak diperlukan untuk mengatasi masalah ini. KPI sebagai pengawas dapat memberi teguran atau sanksi untuk tidak tayang selama seminggu. Di lain sisi, ketika KPI tidak bisa membatasi semua gerak-gerik siaran televisi di Indonesia, maka disinilah peran keluarga dibutuhkan. Keluarga bisa memberikan pilihan tontonan kepada anak, sekaligus memberikan edukasi kepada anak tentang budi pekerti, bentuk menghargai orang lain, saling menyayangi, dan lain-lain. Tayangan yang tidak sesuai dengan aturan penyiaran, dapat dilaporkan kepada KPI. "Setidaknya ada yang bisa kita lakukan, kita bisa melaporkan ke KPI atau kepada pihak berwajib, atau kalau mau tidak perlu menonton acaranya," ujar Kusnul.

(Rika Maharani)



Menjelajah Omah Munir, Museum HAM Pertama Indonesia

Suasana di dalam Museum Omah Munir. (Cahaya Azizah Briyana)

Mengingat sejarah tidak hanya dilakukan lewat buku atau film, museum bisa menjadi alternatif untuk mengenal lebih dekat dan nyata. Di Kota Batu, berdiri museum pertama Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang dikenal sebagai Museum Omah Munir. Melalui museum ini kita dapat melihat barang-barang peninggalan almarhum Munir dan riwayat sepak terjangnya dalam memperjuangkan HAM di Indonesia. Di tengah pandemi kemarin kami berkesempatan untuk mengunjungi museum ini, yuk ikuti perjalanan kami menjelajahi seluk-beluk museum ini!

Omah Munir didirikan pada 8 Desember 2013 oleh istri Munir yaitu Suciwati, dengan bantuan rekan-rekan Munir. Munir Said Thalib merupakan aktivis HAM yang berjuang bagi orang-orang hilang korban orde baru, sekaligus direktur eksekutif dari Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia "Imparsial". Museum yang dulunya rumah keluarga Munir ini didirikan untuk mengingat jasa-jasa Munir sekaligus sebagai sarana edukasi publik mengenai kasus HAM di Indonesia. "Museum Rumah Munir dijadikan sebagai pengingat tentang apa yang dia lakukan sekaligus membahas persoalan HAM seperti kasus orang hilang, isu-isu perburuhan, dan lain-lain," ujar Ali Nur Sahid selaku Direktur Program Omah Munir.

Museum Omah Munir berlokasi di Jl. Bukit Berbunga No.2, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Museum ini cukup mudah ditemukan, karena terdapat papan berwarna merah dengan bertuliskan "Museum HAM Omah Munir" yang terpasang di depan pagar. Jika dari arah Kota Malang, maka museum ini akan kalian temui di sisi kanan jalan. Dari depan, museum ini tampak seperti rumah biasa dengan warna dominan putih dan taman kecil di berandanya.

Memasuki beranda, pengunjung akan disambut dengan Patung Munir dan panel informasi tentang Omah Munir. Kemudian masuk ke dalam museum, terdapat koleksi barang peninggalan Munir yang ditaruh dalam kotak kaca bening. Barang-barang yang dipajang merupakan peralatan Munir dalam memperjuangkan kasus HAM seperti rompi anti peluru, sepatu, kartu identitas, visa, paspor, jaket kulit hingga buku skripsi.

Selanjutnya, di setiap dinding terdapat panel informasi tentang jalan hidup, dan kasus-kasus awal Munir saat memperjuangkan HAM. Di salah satu sisi ruangan juga ditampilkan foto dan ilustrasi orang-orang yang hilang dalam berbagai kasus seperti saat menjelang reformasi, kasus Daerah Operasi Militer Aceh dan lain sebagainya. Tak luput juga terdapat panel tentang kisah perjuangan aktivis HAM

lain seperti Marsinah dan Yap Thian Hiem. Selain itu, pengunjung akan disuguhkan beberapa karya seni 3D yang diperoleh dari pemenang kompetisi seni rupa Omah Munir.

Museum ini juga memiliki program kegiatan khas seperti pertunjukan seni dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2017, Omah Munir menyelenggarakan penggalangan dana dengan menghadirkan beberapa musisi dalam rangka pembangunan ulang Omah Munir. Musisi yang turut andil untuk memeriahkan acara tersebut diantaranya Glenn Fredly, Tompi, Dira Sugandi, dan Idang Rasjidi. Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si., selaku Walikota Batu juga memberikan bantuan dengan meminjamkan lahan



Ornamen depan bangunan Museum Omah Munir.
(Cahaya Azizah Briyana)

Pemerintah Kota Batu untuk didirikan Museum HAM yang baru. Proses pembangunan museum baru ini sudah mulai berjalan di awal tahun 2020. Di tahun 2019, Omah Munir kembali menyelenggarakan kompetisi seni rupa dengan tema "Hak Atas Kehidupan yang Layak." Karya dari pemenang kompetisi ini akan digunakan sebagai tambahan koleksi di Omah Munir yang baru dengan konsep multimedia dan interaktif.

Sebagian besar pengunjung Omah Munir didominasi oleh kalangan muda terutama pelajar mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Omah Munir juga sering menjadi salah satu sasaran bagi instansi pendidikan sebagai tempat *study tour* sekaligus sebagai tempat wisata. "Biasanya di samping melihat-lihat koleksi museum, di sini kami menyiapkan forum, jadi ada diskusi seputar HAM, debat, dan pemutaran film," jelas Heni Rochma sebagai staf administrasi dan operasional Omah Munir. Heni juga

menambahkan, "Untuk rombongan besar yang datang, bisa konfirmasi terlebih dahulu melalui melalui E-mail admin@omahmunir.org, Whatsapp ataupun Instagram @omahmunir supaya dapat disiapkan forum."

Sebelum pandemi COVID-19, Omah Munir buka setiap hari Selasa hingga Minggu pada pukul 10.00 sampai 16.00 WIB. Pengunjung tidak dipungut biaya masuk, tetapi pihak museum menerima donasi. Rata-rata jumlah pengunjung tiap minggunya tidak menentu, tetapi sangat ramai saat akhir pekan dan awal semester baru. Namun saat ini, Omah Munir tidak membuka pengunjung untuk sementara waktu sampai pandemi berakhir. Kami pun baru diperbolehkan mengunjungi



Tampak depan Museum Omah Munir.
(Cahaya Azizah Briyana)

tetapi dengan izin khusus untuk liputan ini.

Sebagai generasi muda yang berpotensi besar dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Omah Munir dapat dijadikan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan jiwa peduli dalam menegakkan HAM di Indonesia. "Harapannya bisa menjadi tempat untuk banyak komunitas dan pelajar, anak muda khususnya, bisa berbagi pengetahuan lewat banyak kegiatan seperti kegiatan pendidikan dan kegiatan budaya. Omah Munir juga dapat menjadi pendorong otomotif ekosistem pendidikan HAM di Indonesia," pungkas Ali Nur Sahid. Adanya museum ini diharapkan tidak hanya sekadar menjadi tempat wisata untuk hiburan semata, tetapi juga dapat memberikan makna akan pentingnya perjuangan HAM di Indonesia.

(Cahaya Azizah Briyana)

Pilu Membiru

Oleh: Adinda Nur Sabhrina

Sore hari ini terlihat sendu, warna abu-abu kelamnya mendominasi langit kala itu. Seakan tak mampu lagi menahan kesedihannya, bulir-bulir air mulai jatuh silih berganti. Aroma khas saat hujan turun disertai semilir angin, menambah kesan tersendiri. Katanya hujan itu tidak hanya tentang genangan, namun juga kenangan? Sepertinya Aleesya setuju dengan hal itu. Sering terlintas kenangan pahit ketika hujan turun, terlebih kejadian yang tidak ia inginkan.

Di ruangan yang berukuran cukup luas untuk dua orang, Aleesya duduk terdiam di hadapan seseorang. Dinginnya hujan dan AC yang menusuk kulit menimbulkan suasana tak nyaman bagi Aleesya. Wanita paruh baya di hadapannya menangkap raut wajah gelisah, takut, dan marah pada diri Aleesya.

"Halo Aleesya, saya Vinda. Boleh kita kenalan dulu atau mau ngobrol hal lain yang menyenangkan," ucap wanita paruh baya itu memecah keheningan yang sedari tadi tercipta. Tatapan yang teduh dan senyuman ramahnya membuat Aleesya merasa nyaman untuk memulai perbincangan.

"Halo Bu Vinda, saya Aleesya boleh dipanggil Ale. Senang akhirnya bisa bertemu dan ngobrol sama Bu

Vinda," timpal Aleesya. Ia memandang wajah wanita paruh baya itu dengan lekat, mencari rasa aman pada psikolog kepercayaan ayahnya itu.

Setelah obrolan pembuka dan basa-basi yang cukup panjang, Vinda mulai masuk pada inti pembicaraan. "Gimana Ale? Udah *nggak* takut kan buat ngobrol sama saya?" tanya Vinda sambil tersenyum.

Aleesya menghela nafas panjang, seraya tersenyum tipis dan menjawab, "Ale berusaha percaya sama Bu Vinda. Ale mau sembuh dan *nggak* takut lagi sama orang seperti waktu itu." Maniknya menelusuri tiap sudut ruangan putih itu dan teringat akan peristiwa-peristiwa yang sangat ingin ia lupakan. Peristiwa memilukan yang membuat dirinya berakhir di ruang konseling bersama psikolog.

Di perpustakaan sekolah...

Tampak seorang gadis tengah membaca buku sambil sesekali menengok ke arah meja di seberangnya. Tanpa ia sadari, ada seseorang yang sedari tadi memperhatikan tingkahnya seraya memukul bahunya pelan. "Hayo Ale lagi ngintipin siapa tuh?" tanya Aurel. Aleesya yang masih kaget, memungut bukunya yang terjatuh

saraya menatap temannya sambil malu-malu. Pipinya merona merah dan tangannya sibuk memegang kacamatanya yang sebenarnya tidak ada masalah. "Wah kesalahan nih aku tanya hal yang udah jelas banget," tambah Aurel seraya tertawa melihat temannya yang salah tingkah.

Aleesya dan Aurel berteman sejak kecil, jelas Aurel paham betul sifat temannya yang pemalu dan tidak percaya diri, padahal kecantikan dan kepintarannya membuat Aurel iri. Aurel tahu, sedari tadi Aleesya mencuri pandang ke arah Rendra yang tengah membaca buku bersama Laura. Yaa, Rendra adalah laki-laki yang dikagumi oleh Aleesya begitu juga Aurel. Namun, semua orang tahu bahwa Rendra telah dekat dengan Laura.

"Kamu enak ya Rel, bisa temenan sama Laura si cewek *famous* di sekolah ini. Tapi aku senang kamu masih mau temenan sama aku," ucap Aleesya lirih.

"Kamu bicara apa sih Le, kamu itu teman baik aku. *Nggak* usah bicara yang aneh-aneh deh," jawab Aurel.

Bagi Aleesya, jawaban Aurel bagai rintik hujan yang datang setelah kemarau panjang. Begitu menyejukkan. Ia bersyukur bisa mengenal Aurel sedari kecil dan berteman sampai mereka duduk di bangku SMA. Namun, jawaban melegakan itu seakan menjadi bumerang bagi Aleesya. Bagai tersambar petir di siang hari yang berawan, Aleesya tercengang melihat apa yang terjadi di

hadapannya.

Niat hati ingin mencari Aurel, ia malah melihat sepasang murid melakukan hal yang tak sepatutnya dilakukan di sekolah. Terlebih mereka adalah Rendra dan Aurel. Aleesya mengerjapkan mata beberapa kali untuk memastikan apakah benar yang bersama Rendra itu temannya atau Laura, karena geng Laura memiliki model tas yang sama. Semakin ia mengelak, semakin pasti jawabannya bahwa perempuan di hadapannya adalah Aurel. Belum sempat Aleesya melangkah pergi dari tempat itu, terdengar seseorang memanggil namanya.

"Ale, aku mohon jangan beri tahu siapa-siapa ya, guru maupun Laura. Anggap saja kamu *nggak* melihat apa-apa," ujar Aurel memohon sambil menggenggam tangan Aleesya.

"Sebentar Rel, aku butuh waktu untuk memahami situasi ini," jawab Aleesya dengan perasaan berkecamuk.

Aleesya yang masih bingung dengan kejadian tadi, segera melepas tangan Aurel dan pergi meninggalkannya. Ya, ia berharap tidak melihat apa-apa. Namun, kejadian tadi membuatnya terus beripikiran yang tidak-tidak. Apa yang harus ia lakukan besok ketika bertemu Aurel? Mengingat mereka adalah teman sebangku.

Tak perlu menunggu waktu yang lama untuk menemukan jawabannya. Ketika pagi tiba, segerombolan geng Laura sudah ada di depan kelas Aleesya. Mereka

PUISI

Lentera

Oleh: Nuraica Martha Septian Wahyuni

Pernak-bernik kehidupan begitu fana
Yang dipuja bagai sajak tak terarah
Penghias petang pun tak terlihat saat mentari
datang
Meraba tentang sebuah rasa semu pada diri

Kegelapan malam hanya bagian alit dari
kehidupan
Insan pun hanya pandai berkata tanpa paham
maksudnya
Tertata rapih konsep kehidupan yang tak
pernah dimengerti insan lain
Yang ada hanya gejalak luka bagai suluh yang
membara

Malam dengan kebusukan bentala ini
Dalam hamparan yang bisu begitu suram hari
esok
Tapi kita bungkam atas kesalahan
Cacat akan lenyapnya keadilan
Mengatakan kebenaran tak lagi bermakna
Saat yang mengatakan tak sedang
berasaskan
Tampak memancarkan kehidupan penuh
duka

Si Kecil yang Baik

Oleh: Raihanah Aulya Kusumaputri

Pada bintang mari bertaruh
Tentang siapa yang paling merasa kuat
Saat jatuh dari harapan yang kokoh
Tatkala delusi dan ego tak lagi searah
Dirimu yang sepi ialah teman
Ia hanya sendiri,
Tak memiliki semesta
Terasa fana dileburkan banyak rasa

Hai kesunyian, sanggupkah kau bangkit?
Kendatipun tidak mengenal dirimu sendiri
Si kecil dari hatimu mengajak untuk berlayar
kembali
Tuk berkenalan lagi dengan kata terbit
Jika sudah,
Temui saya
Temui saya yang tetap berada disini untuk
setiap egomu.

memberhentikan Aleesya, ketika ia akan memasukikelas.

"Eits jadi ini anak yang menyebarkan rumor tentang Laura dan Rendra?" ucap salah satu perempuan, yang bernama Angel.

"Aurel sudah cerita semuanya, kalau kamu itu ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang. Terlebih lagi kamu suka kan sama Rendra?" timpal Laura dengan nada emosi.

Apa Aleesya tidak salah dengar? Aurel yang menuduhnya menyebarkan rumor aneh itu? Belum sempat berbicara, ia ditarik paksa ke arah kamar mandi oleh geng Laura. Detik berikutnya, ia merasakan guyuran air membasahi tubuhnya. Sorakan serta makian terucap dari teman-teman Laura. Ketika Aleesya memberanikan diri untuk membuka mata, ia menemukan sosok Aurel di antara gerombolan itu. Walaupun dari kejauhan, ia melihat bahwa temannya tengah tersenyum melihat ia diperlakukan seperti itu.

Belum cukup dibuat basah kuyup, Laura mengajak Aleesya berkeliling sekolah. Arak-arakan itu sukses membuat murid-murid berhamburan keluar kelas dan menjadikan Aleesya sebagai bahan lelucon. Aleesya memeluk erat tubuhnya yang basah dan menutupi wajahnya dengan rambutnya.

Meskipun pandangannya kabur, Aleesya masih bisa melihat murid-murid di sepanjang koridor kelas merekam dirinya. Ironisnya, tak ada satu pun dari mereka yang berani membantu Aleesya. Samar-samar terdengar suara tangis di balik riuhnya tawa. Laura yang mendengar tangisan

itu menyingkap rambut Aleesya yang terurai, semakin jelas memperlihatkan kondisinya yang kacau. Entah apa yang terlintas dipikiran Laura, ia malah tertawa melihat ekspresi memohon dari Aleesya. Seakan menjadi kepuasan tersendiri melihat orang di hadapannya begitu lemah.

Di ruang konseling...

"Ekspresi Laura sangat menakutkan ketika ia tertawa sambil menyingkap rambut saya," ucap Aleesya sambil memeluk erat dirinya, tatkala kembali teringat ekspresi Laura saat itu.

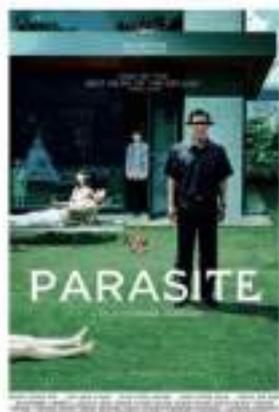
Apalah daya nasi sudah menjadi bubur. Meskipun Aleesya memutuskan untuk pindah ke sekolah yang baru, namun jejak digital dari perlakuan geng Laura kepadanya masih hangat diperbincangkan oleh orang-orang.

"Tatapan orang-orang seolah mengintimidasi. Mereka bergerombol dan berbisik membicarakanku. Sebenarnya apa salahku? Padahal orang-orang tidak tahu kebenarannya?" tanya Aleesya yang disusul dengan derai air matanya.

Vinda menatap iba gadis di hadapannya itu. Ia memeluknya dan menepuk-nepuk pelan punggung Aleesya. "Berdamailah dengan masa pahit itu. Di setiap denting jarum jam, tutup luka itu perlahan. Kamu pantas bahagia mulai detik ini, nanti, dan selamanya, Ale," ucap Vinda menenangkan.

Mungkin pilunya tidak benar sembuh. Birunya masih utuh, hanya sedikit luluh.

PARASITE



Cover Film Parasite.
(Sumber: imdb.com)

Judul Film	Parasite
Sutradara	Bong Joon-Ho
Produser	Boon Joon-Ho, Kwak Sin-Ae, Jang Young-Hwan
Penulis	Bong Joon-Ho, Han Jin-Won
Pemain	Song Kang-Ho, Lee Sun-Kyun, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-Shik, Park So-Dam
Durasi	132 Menit
Genre	Drama, Thriller
Tanggal Rilis	21 Mei 2019 (Cannes), 30 Mei 2019 (Korea Selatan), 24 Juni 2019 (Indonesia)
Bahasa	Korea
Negara	Korea Selatan

Awal 2019, perfilman dunia dikejutkan dengan munculnya film "Parasite" dari Korea Selatan. Film garapan Bong Joon-Ho ini berhasil memenangkan berbagai ajang penghargaan bergengsi dan menjadi film pertama di Asia yang memboyong empat Piala Oscar. Kategori yang dimenangkan antara lain Sutradara Terbaik, Film Terbaik, *International Feature Film*, dan *Best Original Screenplay*. Tak dapat dipungkiri, "Parasite" memang epik. Boong Joon-Ho berhasil memukau dunia dengan kombinasi cerita yang sarat kritik sosial, *plot twist* dan drama yang unik.

Film ini menceritakan tentang konflik antara keluarga Kim Ki-Taek yang miskin dan keluarga Park yang kaya raya. Keseruan dimulai ketika anak laki-lakinya, mendapat tawaran pekerjaan menjadi guru les Bahasa Inggris untuk anak gadis dari Keluarga Park. Ketika ia sadar, begitu mudahnya membohongi keluarga Park saat melamar di sana, ia pun menyeret satu persatu keluarganya yang miskin untuk bekerja di rumah mewah tersebut. Di sinilah ide untuk menjadi parasit dimulai.

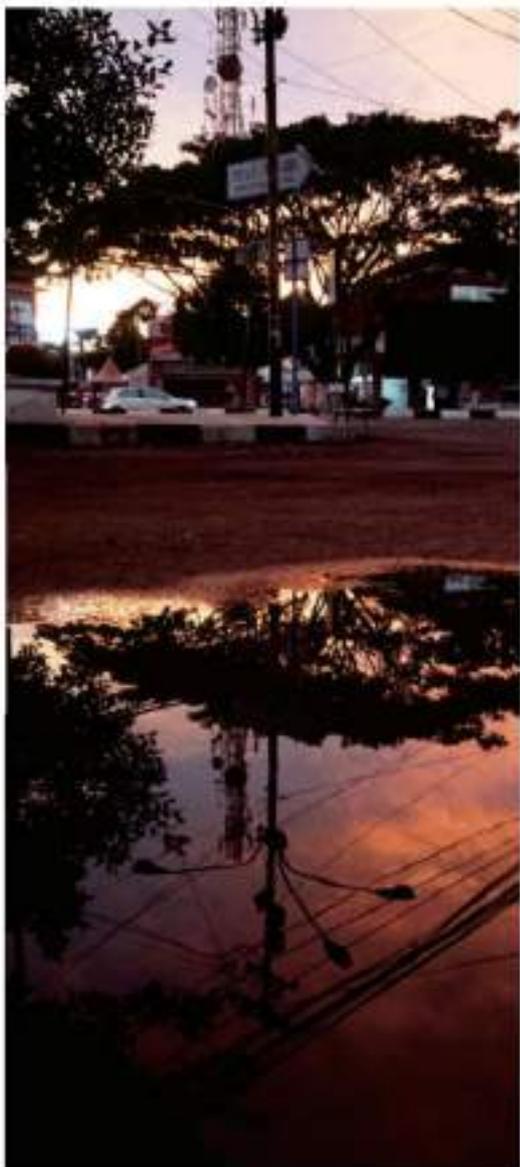
Film dengan durasi 132 menit ini memiliki alur yang sulit ditebak dan konfliknya juga tidak terbaca. Di awal film digambarkan drama komedi keluarga miskin yang mampu membuat penonton tertawa miris. Selanjutnya penonton diajak memasuki konflik yang perlahan-lahan semakin serius dan mencekam. *Plot twist* di akhir film juga begitu mencengangkan, sangat jauh dari bayangan komedi di awal film. Setiap pemain

dalam film ini pun memiliki karakter unik dan vital. Kebohongan antar karakter harus terjaga rapi, karena satu kesalahan akan merusak seluruh jalan cerita.

Selain cerita, makna film ini juga seakan menampar realitas sosial di Korea Selatan tentang ketimpangan antara si miskin dan kaya yang begitu besar. Kita dapat melihat ini dari adegan bau badan antara sopir dan majikan yang berulang kali dibahas. Adegan lain seperti perbandingan rumah keluarga Kim saat terkena banjir dan keluarga Park yang justru bersyukur karena hujan, seakan menunjukkan dengan halus bagaimana parahnya ketimpangan ini.

Banyak hal unik yang patut disoroti dari "Parasite". Contohnya latar utama yang berfokus pada rumah. Rumah keluarga Kim yang rumit dan mewah menjadikannya hal yang sangat *memorable* dari film ini. Kerumitan arsitektur dan ruangan rahasia dari rumah tersebut menjadi misteri tersendiri untuk dipecahkan. Keunikan lain terlihat dari kode Morse yang telah hadir sejak awal film dan poster yang sederhana juga misterius. Selain itu, narasi yang brilian dan dialog antar pemain yang sederhana, menjadikan setiap adegan begitu berharga. Semua itu juga didukung dengan sinematografi yang apik dan *scoring* yang mendebarkan. Akhir kata "Parasite" memang sebuah *masterpiece*, sungguh sangat disayangkan jika dilewatkan begitu saja.

(Alivia Ramadhani)



Bahaya Peretasan, Bagaimana Cara Mengamankan Media Sosial Kita?



Seorang *hacker* mengambil alih data milik korban. (Resa Mahendra)

Penggunaan media sosial (medsos) saat ini berkembang pesat, hampir semua kalangan mulai dari remaja hingga dewasa menggunakan medsos sebagai sarana komunikasi hingga hiburan. Banyaknya pengguna medsos juga membuat semakin maraknya tindak kejahatan siber seperti peretasan dan pencurian data pribadi.

Salah satu peristiwa peretasan yang baru saja terjadi adalah peretasan akun WhatsApp milik aktivis Ravio Patra pada Rabu, 22 April 2020. Akun Whatsappnya diretas dan digunakan untuk menyebarkan pesan provokasi. Akibatnya, Ravio Patra ditangkap polisi atas dugaan penghasutan, ujaran kebencian, dan menyiarkan berita yang menyebabkan keonaran. Setelah ditahan selama 33 jam, akhirnya Ravio

dibebaskan oleh Polda Metro Jaya pada Jumat 24 April. Meski Ravio telah bebas dan berstatus sebagai saksi, Polri menyatakan kasus hukumnya masih berjalan dan diselidiki.

Peretasan seperti yang dialami Ravio dapat terjadi pada siapa saja. Menanggapi permasalahan keamanan ini, Vipkas Al Hadid Firdaus, S.T., M.T. Dosen Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang (Polinema) menuturkan jika media sosial tidak ada yang sepenuhnya aman. Beliau menjelaskan jika persentase media sosial seseorang dapat diretas bukan karena faktor penggunaannya sangat tinggi, berkisar 75%. Ketidaktahuan pengguna media sosial atas fitur keamanan aplikasi dapat menjadi celah untuk peretasan. "Contoh misalnya *password*, apakah sudah mengikuti etika pembuatan *password* dengan benar, tidak mudah untuk diretas karena kan ada ketentuan harus berapa kata, kombinasi angka, huruf, symbol dan sebagainya apakah sudah terpenuhi? sudah rutin *back-up*? sesuatu seperti itu kadang pengguna mengabaikan itu," ujar Vipkas.

Beliau juga menjelaskan, dalam etik peretasan salah satu metodenya adalah *social engineering* (rekayasa sosial). Rekayasa ini dibuat agar peretas dapat mengakses data pribadi korban. Contohnya adalah peristiwa pencurian data Facebook oleh dua warga Ukraina pada 2019. Mereka diduga mereka melakukan pencurian data melalui sebuah aplikasi kuis. Aplikasi yang ini dapat membaca karakter atau kepribadian si pengguna. Selain itu dapat memancing pengguna agar memberikan data pribadi mereka, nantinya aplikasi mengarahkan

pengguna untuk memasang ekstensi browser web yang kemudian membuka akses ke akun Facebook pengguna. Tak hanya itu, pelaku pun bisa mencuri data dari akun media sosial lainnya.

Dari sisi keamanan siber, Muhammad Isfa Hani seorang *Security Researcher* di sebuah perusahaan keamanan siber Seclab Indonesia, menuturkan pentingnya pengaktifan keamanan di medsos, salah satunya fitur *Two Factor Authentication* (TFA). TFA adalah sistem keamanan berlapis yang dirancang untuk memastikan bahwa hanya pemilik akun yang dapat mengakses akun miliknya. Pengaktifan TFA pada Whatsapp dapat dilakukan dengan cara:

1. Buka aplikasi masuk ke bagian Menu yang ikon titik tiga di pojok kiri atas layar,
2. Pilih menu *setting* kemudian klik tulisan akun,
3. Selanjutnya klik pilihan verifikasi dua langkah dan aktifkan.
4. Lalu masukkan PIN berupa angka dan juga alamat surat elektronik (surel) untuk verifikasi, dan TFA sudah bisa dijalankan.

Bagaimana jika akun media sosial kita diretas?

Ketika akun medsos kita diretas, hal pertama yang harus dilakukan ketika akun sosmed diretas adalah tidak panik. Isfa menjelaskan, korban dapat melapor kepada pihak media sosial agar akunnya dinonaktifkan. Cara ini bisa dilakukan melalui surel seperti di Facebook atau melaporkan akun korban dengan bantuan teman. Sedangkan untuk pengembalian akun, korban dapat mengklaim dengan surel pemulihan apabila telah diatur di awal.

"Kalau diretas, poin pertama adalah jangan cari orang untuk *hack* balik, itu gak bisa. Karena kita harus paham dulu konsep *hacking* dia itu seperti apa sih. Asal mula bisa diretas, bisa *passwordnya* lemah, bisa kita klik *link* sembarangan atau pasang aplikasi tapi disusupin sesuatu yang bisa *take over* hp kamu," ujar Isfa.

Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanudjaya menuturkan dengan mengambil contoh pada aplikasi WhatsApp. Pemilik akun WhatsApp yang asli harus segera mengambil kembali akun WhatsApp yang diretas dengan melakukan instalasi ulang aplikasi WhatsApp sesegera mungkin di ponselnya. Kemudian, *login* dengan nomor WhatsApp yang telah diretas tadi, "Kita akan bisa mengambil kembali akun kita karena kode verifikasi akan dikirimkan hanya melalui SMS ke nomor WhatsApp kita," tuturnya. Alfons mewanti-wanti agar pemilik asli akun WhatsApp bergerak cepat, sehingga peretas tidak bisa memproteksi akun dengan nomor PIN.

Di Indonesia undang-undang terkait perlindungan data pribadi belum juga disahkan. Padahal pencurian data pribadi memiliki dampak yang sangat krusial. "Misalnya anggota KPK menangani kasus besar lalu data pribadi anggota ini bocor maka yang diserang bukan dia saja tapi keluarganya juga. Mengancam profesi dia sebagai penegak hukum," ujarnya. Mahasiswa pun juga seharusnya mulai waspada dengan peretasan data. Salah satunya Dito Cahya Pratama mahasiswa dari Jurusan Teknik Informatika Program Studi D4 Teknik Informatika Polinema, "Kalau diretas ini bisa bahaya, misal data saya diretas, nah orang lain menggunakan data saya dibuat untuk jual beli di pasar gelap, bisa jadi data saya digunakan untuk hal negatif, misal dibuat untuk *support* teroris," paparnya.

Untuk menjaga data kita, tentu langkah pencegahan harus dilakukan. Masyarakat harus menanamkan kesadaran dari awal bahwa data pribadi di medsos dapat diambil alih oleh pihak tak bertanggung jawab. "Siapa pun beresiko untuk menjadi korban peretasan. Dari awal harus diantisipasi," ujar Vipkas.

(Aditya Firman Roziansyah)

Bantuan dan Kebijakan Polinema di Masa Pandemi, Apa Kata Mereka?

Selama masa pandemi COVID-19, Politeknik Negeri Malang (Polinema) telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan seperti bantuan pulsa untuk pembelajaran dalam jaringan (daring), bantuan sembako dan lain-lain. Kami berhasil menghimpun berbagai macam pesan dari civitas academica Polinema terkait hal ini. Berikut beberapa di antaranya:

Andika Dwi Kristianto (Mahasiswa Akuntansi)

"Semoga Polinema dapat mempertimbangkan kembali untuk menambah jumlah paket bantuan, baik sembako maupun dana pulsa LinkAja yang digunakan mahasiswa selama kegiatan perkuliahan daring. Selain itu, paket sembako bagi mahasiswa yang hingga saat ini masih stay di kos saya rasa juga kurang," tutur Andika.



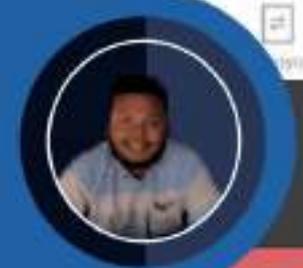
Nurul Kholifah (Mahasiswa Teknik Elektro)

"Paket sembako yang diberikan Polinema sudah sangat membantu. Akan tetapi, isinya yang berupa mi instan alangkah lebih baik diganti dengan makanan yang lebih bergizi. Mengenai kegiatan perkuliahan, Polinema sebaiknya membuat web atau form dengan kartu kendali khusus bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Diharapkan nantinya fasilitas ini dapat memudahkan dosen pembimbing dan mahasiswa dalam berkomunikasi," terangnya.



Wahyu Yulianto (Juru Parkir)

"Bantuan berupa *hand sanitizer* dan masker telah diberikan Polinema. Namun, penyediaan fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan lebih ekstra lagi. Salah satunya dengan menyediakan sabun yang selama ini belum tersedia di tempat cuci tangan parkir Jurusan Administrasi Niaga dan Akuntansi bagian depan," ujarnya.





Mochamad Khamim, SST., MT (Dosen Teknik Sipil)

"Polinema telah memberikan bantuan kepada mahasiswa, tenaga pendidikan, dan tenaga pendukung pendidikan untuk menunjang berjalannya kegiatan perkuliahan secara daring. Uang pulsa sebesar Rp450.000,00 untuk tiga bulan saya rasa sudah cukup untuk meringankan beban mengajar".



Padma Adriana Sari, SE., MSA., AK (Dosen Akuntansi)

"Hingga saat ini, belum ada standar yang jelas terkait prosedur absensi mahasiswa serta pelaporan kinerja dosen. Alangkah lebih baik, apabila Polinema menyediakan fasilitas secara daring bagi mahasiswa luar kota yang hendak mengurus administrasi. Untuk bantuan, Polinema memberikan bantuan Rp150.000 dan pelatihan dosen yang saya rasa itu mampu mempermudah proses perkuliahan," ujarnya.



Gilang Anjasmara (Pamdal)

"Pamdal mendapatkan tambahan gaji karena tetap bekerja seperti hari biasa saat kuliah *offline*. Sayangnya, saya masih banyak menemukan mahasiswa yang tidak melakukan pengecekan suhu badan dan tidak memberikan surat izin masuk di gerbang kampus depan," pungkasnya.



Ivfa Tut Tazkiyah (Mahasiswa Teknologi Informasi)

"Perhatian Polinema yang diberikan mengenai penyaluran bantuan, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan daring. Selama pembelajaran daring, salah satu keluhan yang dialami ialah tidak seimbang antara jumlah tugas dengan batas waktu pengumpulan. Diharapkan, *deadline* pengumpulan tugas bisa dilonggarkan agar memudahkan mahasiswa, mengingat koneksi internet di setiap daerah berbeda-beda," ujarnya.

(Kirana Diffa Alethea Syahda)

Menyoal Permasalahan *Catcalling* di Indonesia

Pernahkah kalian para wanita, mendengar sapaan seperti “Duh ada cewek cantik *nih*, jalan sendirian aja,” atau “Hai cewek, boleh kenalan *nggak?*” ketika sedang berjalan di tempat umum? Biasanya sapaan tersebut diucapkan secara spontan dan diikuti gelak tawa. Padahal tindakan ini bukan sekadar candaan belaka dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan.

Sapaan dan godaan yang diikuti siulan oleh sekumpulan laki-laki ini disebut *catcalling*. Kebanyakan dari mereka melakukan ini untuk mendapatkan perhatian lebih dari lawan jenis dan berharap mendapatkan respon balik. Dalam *Oxford Dictionary*, *catcalling* didefinisikan sebagai panggilan dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki kepada perempuan yang lewat dihadapannya. *Catcalling* termasuk ke dalam pelecehan seksual verbal yang terjadi tanpa kesukarelaan korban dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Di Indonesia, pelecehan verbal ini masih sering terjadi. Berdasarkan survei *change.org* tentang pelecehan seksual di ruang publik, sebanyak 60% dari 62.000 responden mengalami pelecehan secara verbal seperti komentar atas tubuh, siulan, komentar rasis, dan masih banyak lainnya.

Kenapa pelecehan verbal masih banyak terjadi? Menurut saya, faktor pemicunya adalah ketidaktahuan masyarakat akan pelecehan seksual. Mereka berdalih godaan yang dilontarkan adalah pujian dan candaan belaka. Padahal dampak yang dirasakan korban juga tak main-main. Sebuah studi dari Norwegian University of Science and Technology yang dilakukan pada hampir 3.000 siswa-siswi sekolah



Perempuan yang sedang mengalami *catcalling*. (Deo Fahmawan)

menengah atas, mengungkapkan bahwa pelecehan seksual non-fisik seperti *catcalling* dapat menimbulkan masalah kesehatan mental, mulai dari rasa tidak nyaman, depresi, kecemasan, perasaan rendah diri dan citra negatif terhadap tubuh. Selain itu, mereka akan seringkali “was-was” ketika bepergian karena merasa tidak aman.

Di Indonesia, penyebab terjadinya *catcalling* seringkali dihubungkan dengan cara berpakaian korban yang terbuka. Korban seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Masyarakat mewajarkan tindakan ini dengan alasan pakaian korban yang memancing *catcalling*. Namun faktanya, hasil survei dari *change.org* di atas juga menunjukkan bahwa mayoritas korban pelecehan seksual di ruang publik tidak mengenakan baju terbuka, melainkan memakai celana atau rok panjang (18%), hijab (17%), dan baju lengan panjang (16%). Melalui survei ini, dapat diartikan baik perempuan berbaju terbuka maupun tertutup sama saja berpotensi menjadi korban pelecehan seksual. Hubungan antara *catcalling* dengan cara berpakaian hanya alasan untuk dijadikan pembenaran otak kotor dalam diri pelaku.

Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, dan Perancis, mereka sudah memiliki Undang-Undang (UU) yang mengatur pelecehan verbal. Pelaku tersebut

dapat dijatuhi hukuman, mulai dari denda hingga ancaman penjara. Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Catcalling termasuk perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Professor Simons dalam (Livia & Suardita, 2019:5) menjelaskan jika unsur-unsur tindak pidana tersebut meliputi adanya perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. *Catcalling* memenuhi unsur tersebut karena terdapat perbuatan asusila, unsur pornografi, melawan hukum dengan mengganggu hak manusia lain dan adanya pelaku.

Sayangnya di Indonesia belum terdapat dasar hukum yang tegas mengenai pelecehan verbal. Selain normalisasi *catcalling*, tidak tegasnya hukum di Indonesia juga menjadi masalah. Aparat penegak hukum harus menggabungkan beberapa pasal pada KUHP dan UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi untuk menyelesaikan perkara pelecehan ini. Tetapi penggunaan pasal ini belum mampu menjamin kepastian hukum secara maksimal. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diajukan pada 2012 menjadi harapan untuk kasus pelecehan seksual. Melalui RUU ini, bentuk pelecehan verbal seperti *catcalling* diatur lebih spesifik. Hal tersebut dapat dilihat dalam RUU PKS Pasal 12 yang berbunyi: "Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan". Artinya, tindakan-tindakan seperti *catcalling* bisa termasuk ke dalam pelecehan seksual. Tindakan ini diancam pidana kurungan selama 5 sampai 6 tahun. Sayangnya, RUU PKS yang digadang-gadang sebagai solusi ini malah ditarik dari Program Legislasi Nasional di DPR. Tentu ini sangat mengecewakan, pemerintah yang

seharusnya melindungi dan menciptakan ruang aman bagi rakyatnya malah terkesan tidak begitu peduli.

Sebenarnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan wanita agar kasus *catcalling* tidak bertambah luas. Pertama adalah mengedukasi masyarakat tentang bentuk pelecehan verbal serta dampaknya. Kedua, menghindari melewati jalanan sepi sendirian bagi wanita, karena tingginya resiko kejahatan dan sulit bagi korban untuk meminta pertolongan. Ketiga, sebisa mungkin tetap berpakaian yang rapi dan tertutup. Hal ini sebagai langkah pencegahan, meskipun kita tahu pakaian bukan faktor utama. Cara selanjutnya adalah *speak up* kepada publik. Dengan berani berbicara dan melaporkan maka akan memunculkan kepedulian di masyarakat.

Salah satu contoh bentuk dari *speak up* yaitu gerakan Hollaback. Gerakan ini pertama kali dimulai di New York pada tahun 2004 dan tersebar di berbagai negara. Di Jakarta, terbentuknya gerakan global Hollaback! membantu memberikan ruang aman bagi para korban sekaligus mengedukasi masyarakat terkait pelecehan dan kekerasan seksual melalui media sosial. Bersama gerakan ini, korban dapat mengikuti penyuluhan serta berbagi cerita mengenai kasus pelecehan seksual.

Dari pemaparan di atas, bila ditanya lagi seberapa penting pemahaman dan perhatian masyarakat terkait kasus *catcalling*? Jawabannya adalah sangat penting. Pemerintah dan masyarakat harus bersama menciptakan lingkungan yang aman dari pelecehan. Selain itu, pemerintah harus mampu memberikan perlindungan yang dapat menghapus rasa malu akibat stigma, memulihkan psikis korban dan menghentikan normalisasi *catcalling* di masyarakat. Dengan sinergi dari masyarakat dan sumber daya pemerintah, lingkungan ini perlahan dapat berubah menjadi lebih baik. Jadi, mari sahkan RUU PKS, *stop catcalling, and lets speak up!*

(Adinda Nur Sabhrina)

KOMIK

“Kerja Bakti”

Cerita oleh Shanti Kumala Dewi

Ilustrasi oleh Salsabila Rachma Aninda



HUMOR

“Mie Ayam”

Oleh Nabila Permatasari Handoko

Pembeli: “Mas, beli mie ayam satu.”

Penjual: “Siap, ayamnya dikit atau banyak, Mbak?”

Pembeli: “Sedang, Mas. Nggak dikit nggak banyak juga.”

Penjual: “Ayamnya mau ayam kampung, kate, bangkok, apa ayam potong?”

Pembeli: “Hm... ayam potong, Mas.”

Penjual: “Potongnya di bagian mana, Mbak?”

Pembeli: “Terserah, Mas. Asalkan yang daging jangan tulang semua.” (nada kesal)

Penjual: “Oh iya, Mbak. Ayamnya lokal apa impor?”

Pembeli: “Lokal, Mas.”

Penjual: “Mau ayam jawa, kalimantan, atau...?”

Pembeli: “Jawa deh, Mas. Udah cepetan. Saya lapar ini, Mas.”

Penjual: “Loh di sini menu lengkap, Mbak. Jadi harus detail kalau mau pesan.”

Pembeli: “Iya iya iya, Mas. Saya cuma mau pesan mie ayam satu. Terserah mau ayam lokal, impor, jawa, dan apapun itu. Tolong cepat dimasak ya.” (marah)

Penjual: “Gitu aja marah-marah, Mbak. Sebenarnya saya penjual gorengan sebelah, Mbak. Saya cuma disuruh tanya-tanya gini, sambil nunggu penjual aslinya datang hehehe.”

Pembeli: “Hmmm, kenapa nggak bilang dari tadi, Bambang.”

Penjual: “Nama saya Pardjo, Mbak. Bukan Bambang.”

Pembeli: “Terserah dah, Mas. Udah saya diam aja daripada terluka.”

QUIZ

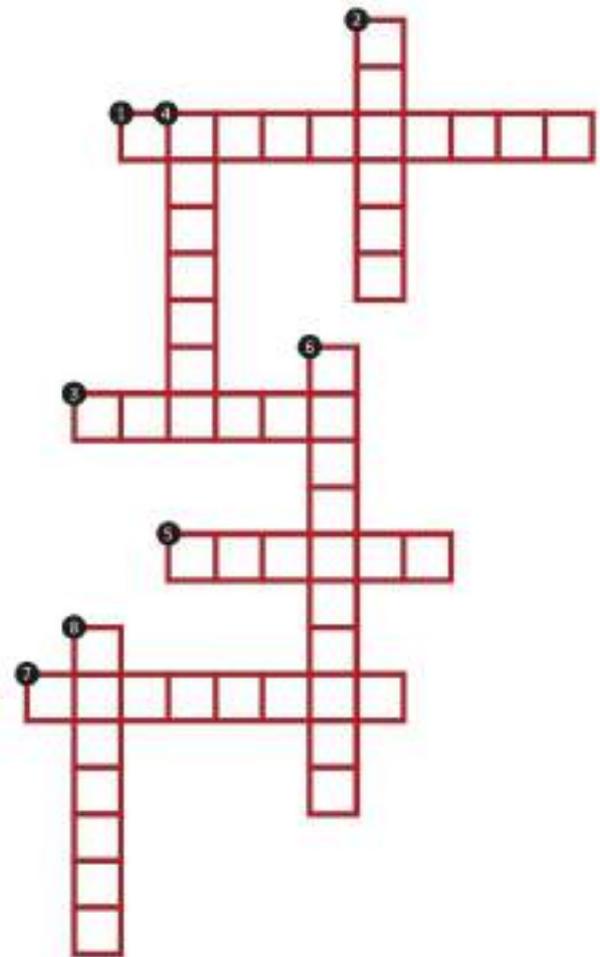


Kirimkan jawaban quiz anda maksimal satu minggu setelah majalah terbit. Jawaban dapat dikirimkan ke e-mail LPM Kompen yaitu perspolinema@gmail.com jawaban dikirim dalam format dokumen ms. word

Dapatkan hadiah menarik dari kami!

MENDATAR

1. Menurut Bantuan Hukum (LBH), kasus kekerasan terhadap perempuan menduduki tingkat 12,5% sebanyak 15 kasus, sedangkan kasus terbesar menduduki tingkat sebesar 40% mengenai hak-hak....
3. Masalah utama yang menjadi penyebab meningkatnya masalah kesehatan mental di Indonesia khususnya dari sisi masyarakat adalah...
5. Menurut Luqman bahwa penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia terus terjadi dengan didukung faktor salah satunya adalah...
7. Kebebasan berpendapat politik mahasiswa-mahasiswa Papua yang dilakukan secara damai telah diacuhkan oleh aparat keamanan lewat tindakan...



MENURUN

2. Women Crisis Centre (WCC) mencatat terdapat 17 kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus yang salah satunya meliputi kekerasan...
4. Berdasarkan wawancara eksklusif dengan BBC News pada Februari 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ia lebih fokus dalam hal
6. siulan, panggilan dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki kepada perempuan yang lewat di hadapannya disebut...
8. Salah satu dampak rasisme yaitu terganggunya mental korban seperti..

“ Yang menjadi pena adalah kebaikan,
yang menjadi tinta adalah kemanusiaan. ”

-Najwa Shihab-

Social Media



LpmKompem



@lpmkompem



lpmkompem



@rlo8427q



Lpm Kompem TV



lpmkompem.com